



# MODEL ORKESTRASI EKOSISTEM UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL INKLUSIF DI INDONESIA

ORASI PENGUKUHAN PROFESOR RISET  
ILMU SOSIOLOGI, BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL  
KEPAKARAN PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN SOSIAL



OLEH:

**MU'MAN NURYANA**

**BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**

**MODEL ORKESTRASI EKOSISTEM  
UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL  
INKLUSIF DI INDONESIA**

Diterbitkan pertama pada 2026 oleh Penerbit BRIN

Tersedia untuk diunduh secara gratis: [penerbit.brin.go.id](http://penerbit.brin.go.id)



Buku ini di bawah lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).

Lisensi ini mengizinkan Anda untuk berbagi, mengopi, mendistribusikan, dan mentransmisi karya untuk penggunaan personal dan bukan tujuan komersial, dengan memberikan atribusi sesuai ketentuan. Karya turunan dan modifikasi harus menggunakan lisensi yang sama.

Informasi detail terkait lisensi CC BY-NC-SA 4.0 tersedia melalui tautan:  
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>



# **MODEL ORKESTRASI EKOSISTEM UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL INKLUSIF DI INDONESIA**

**ORASI PENGUKUHAN PROFESOR RISET  
ILMU SOSIOLOGI  
BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL  
KEPAKARAN PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN  
SOSIAL**

**OLEH:  
MU'MAN NURYANA**

Penerbit BRIN

© 2026 Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)  
Pusat Riset Kebijakan Publik

Katalog dalam Terbitan (KDT)  
Model Orkestrasi Ekosistem Untuk Kesejahteraan Sosial Inklusif Di Indonesia/Mu'man  
Nuryana–Jakarta: Penerbit BRIN, 2026

ix + 134 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISSN 3090-3485




- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Kesejahteraan sosial inklusif | 2.Orkestrasi ekosistem sosial |
| 3. Ko-kreasi layanan publik      | 4. Tata Kelola kolaboratif    |
| 5. Pendekatan kapabilitas        |                               |

361.6

*Copy editor* : Martinus Helmiawan  
*Proofreader* : Martinus Helmiawan  
Penata Isi : Utami Dwi Astuti  
Desainer Sampul : Utami Dwi Astuti

Edisi pertama : 2026



Diterbitkan oleh:  
Penerbit BRIN, Anggota Ikapi  
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah  
Gedung B.J. Habibie Lt. 8, Jl. M.H. Thamrin No.8,  
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340  
Whatsapp: +62 811-1064-6770  
E-mail: [penerbit@brin.go.id](mailto:penerbit@brin.go.id)  
Website: [penerbit.brin.go.id](http://penerbit.brin.go.id)  
 PenerbitBRIN  
 @Penerbit\_BRIN  
 @penerbit.brin

## DAFTAR ISI

BIODATA RINGKAS .....	1
PRAKATA PENGUKUHAN .....	5
I. PENDAHULUAN.....	11
A. Latar Belakang dan Kerangka Masalah.....	11
B. Sari Pati dan Kebaruan Model Orkestrasi Ekosistem .....	17
II. DINAMIKA KEILMUAN DAN TRANSFORMASI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL: DARI PARADIGMA KONVENSIONAL MENUJU EKOSISTEM INOVATIF DAN BERKELANJUTAN .....	21
A. Evolusi Paradigma dan Perkembangan Teoretis .....	23
B. Disrupsi Digital dan Transformasi Teknologi Sosial .....	25
C. Paradigma Baru: Ekosistem Inovatif dan Orkestrasi Sosial .....	26
D. Tantangan Epistemologis dan Agenda Keilmuan Masa Depan ...	28
E. Arah Transformasi Ilmu Kesejahteraan Sosial.....	30
III. TRANSFORMASI EKOSISTEM KESEJAHTERAAN SOSIAL INDONESIA: DARI PETA KERENTANAN MENUJU MODEL TERPADU ORKESTRASI EKOSISTEM .....	33
A. Dinamika Struktural dan Peta Kerentanan dalam Ekosistem Kesejahteraan Sosial Indonesia.....	34
B. Orkestrasi Ekosistem Terpadu dalam Transformasi Kesejahteraan Sosial yang Inklusif dan Berbasis Komunitas .....	40
IV. FORMULASI MODEL ORKESTRASI EKOSISTEM UNTUK TATA KELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA .....	51
A. Model Orkestrasi Ekosistem sebagai Kontribusi Ilmiah .....	51
B. Aspek Teoretis dan Ilmiah .....	52
C. Dampak Ilmiah dan Penemuan Konseptual .....	53
V. DINAMIKA STRATEGIS DAN TRANSFORMATIF MODEL ORKESTRASI EKOSISTEM .....	55

A. Relevansi Strategis bagi Pemerintah dan Masyarakat .....	55
B. Implikasi untuk Tata Kelola Pemerintahan .....	56
C. Rekomendasi Strategis Prioritas Pemerintah.....	57
D. Dampak Praktis Jangka Panjang.....	58
E. Dialog dengan Riset Eksternal dan Relevansi Global.....	58
F. Mekanisme Implementasi Minimal dalam Kerangka Orkestrasi Ekosistem .....	59
VI. KESIMPULAN .....	61
VII. PENUTUP.....	63
UCAPAN TERIMA KASIH .....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	69
DAFTAR CAPAIAN DALAM BIDANG IPTEK, RISET, DAN INOVASI.....	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	115

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Piramida Dinamika Struktural dan Peta Kerentanan dalam Ekosistem Kesejahteraan Sosial Indonesia.....	39
Gambar 2.	Transformasi Ekosistem Kesejahteraan Sosial Indonesia: Dari Peta Kerentanan Menuju Model Terpadu Orkestrasi Ekosistem .....	50



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Evolusi Ilmu Kesejahteraan Sosial: Dulu–Sekarang–Depan (Nasional, Regional, Internasional).....	22
----------	--	----



## BIODATA RINGKAS



Mu'man Nuryana, lahir di Garut pada tanggal 24 Februari 1957, merupakan anak pertama dari Mochammad Chaerudin dan Siti Ating Maryati, dan anak keenam dari Siti Ating Maryati. Ia menikah dengan Dini Damayanti, S.S. dan dikaruniai tiga orang anak: Shitami Ambarsari, S.Psi.; Hitomi Hadinuryana, S.T., M.T.; dan Reika Athalia Nuryana, Dipl. in International Fashion Business.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/M Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022, ia diangkat sebagai Peneliti Ahli Utama BRIN.

Berdasarkan Keputusan Kepala BRIN Nomor 81/I/HK/2026 tanggal 10 Februari 2026 tentang Pembentukan Majelis Pengukuhan Profesor Riset (MPPR), yang bersangkutan dinyatakan dapat menyampaikan pidato Pengukuhan Profesor Riset.

Riwayat pendidikan: menamatkan SD Muhammadiyah Garut (1969), SMP Negeri I Garut (1972), dan SMA Muhammadiyah Garut (1976). Beliau memperoleh gelar Sarjana Sosial Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (1981), gelar Magister Sains (M.Sc.) dalam Ilmu Hortikultural Economics dari Chiba University, Jepang (1995), dan gelar Doktor (Ph.D.) bidang Agricultural Economics dari Nihon University, Jepang (1998).

Mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang terkait bidang kompetensi, antara lain: Lokakarya Minat Indonesia: Problem Solving and Decision Making, PPM Jakarta (1984);

Diklat Analisa Proyek Pembangunan Angkatan XVII, LPEM UI (1989); Traffic and Safety Sciences, IATSS Forum, Suzuka, Jepang (1989); Preliminary Japanese Language, Tsukuba University, Jepang (1991); Kenkyusei (Research Student) Programme, Chiba University, Jepang (1991–1993); Modernizing the Policy Process, LAN–Department of International Development (UK), Indonesia (1999); Diklatpim Tingkat IV/ADUM (1999), Tingkat III/SPAMA (1999), serta Teknik dan Manajemen Kebijakan Publik, LAN Jakarta (2000); Short-Term Training Course on Social Welfare Policy and Practice, Japan College of Social Work, Tokyo (2005); FY2006 JSPS Fellowship Program (Post-Doctoral), Graduate School of Public Policy and Social Governance, Hosei University, Tokyo (2006/2007); Diklatpim Tingkat II, LAN Jakarta (2001) dan Tingkat I, LAN Jakarta (2008); Training-Workshop South-South Technical Cooperation: Indonesia Experiences, GOI-JICA/NAM-CSSTC, Jakarta (2009); Training-Workshops on Japanese National Disaster Management Policy/Framework and Disaster Victim Stress Management, Shinshu University, Jepang (2015); dan Strategic Planning and Policy Development, The University of Queensland, Brisbane, Australia (2012).

Riwayat jabatan struktural antara lain: Kepala Seksi Perencanaan Program (1998) dan Kepala Bagian Evaluasi dan Laporan Hasil Penelitian (1999) di Departemen Sosial RI; Asisten Deputi Urusan Aspek Sosial Politik pada Kementerian Negara Masalah-Masalah Kemasyarakatan/Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN) (2000–2001); Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial RI (2006–2012); Sekretaris Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial (2012); Staf Ahli Bidang Dampak Sosial (2013); Kepala Badan Pendidikan,

Penelitian dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial RI (2014–2016); dan Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial (2017).

Jabatan fungsional peneliti dimulai sebagai Ajun Peneliti Muda golongan III/d (2001), Ahli Peneliti Madya golongan IV/b (2006), dan memperoleh jabatan Peneliti Utama golongan IV/e bidang Kesejahteraan Sosial (2017).

Menghasilkan sembilan puluh dua (92) karya tulis ilmiah (KTI), baik penulisan tunggal maupun bersama, dalam bentuk buku, jurnal, dan prosiding. Sebanyak 70 karya ditulis dalam bahasa Indonesia dan 22 karya dalam bahasa Inggris.

Dalam organisasi profesi ilmiah, ia aktif sebagai anggota Himpenindo/PPI (2001–sekarang).

Saat bertugas di Kementerian Sosial RI, ia turut membina kader ilmiah sebagai ko-promotor program doktor bidang ilmu kesejahteraan sosial di Universitas Indonesia, dan pembimbing Mata Kuliah Pengantar Disertasi (MKPD) ilmu sosiologi dengan konsentrasi gerontologi sosial di Universitas Airlangga.

Ia menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun (2010) dan Satyalancana Karya Satya XXX Tahun (2018) dari Presiden Republik Indonesia; Australia Alumni Prize Award with Outstanding Commencement dari Department of Foreign Affairs and Trade Pemerintah Australia (2013); dan Australia Awards in Recognition of Professional Achievement for Successfully Completing “Developing GoI KA Liaison Officers (Part II): Identifying and Utilizing the Strengths and ADS Candidates and Alumni” (2012) dari LUTAN Edukasi-AXZO.



## PRAKATA PENGUKUHAN

*Bismillaahirrahmaanirrahiim.*

*Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia Majelis Pengukuhan Profesor Riset, para pimpinan instansi, dan hadirin yang saya hormati.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dan bersama-sama hadir pada acara orasi ilmiah pengukuhan Profesor Riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan segala kerendahan hati, izinkan saya pada tanggal 31 Maret 2026 menyampaikan orasi ilmiah dengan judul:

### “MODEL ORKESTRASI EKOSISTEM UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL INKLUSIF DI INDONESIA”

Dalam orasi ini, Model Orkestrasi Ekosistem (MOE) dimaknai sebagai pendekatan untuk menata ulang cara kerja kesejahteraan sosial agar lebih terpadu, adaptif, dan inklusif. Model ini tidak dipahami sebagai layanan satu pintu atau program tertentu, melainkan sebagai arsitektur tata kelola yang menyelaraskan aktor, data, dan proses pembelajaran kebijakan lintas sektor dan lintas level. Secara konseptual, pendekatan ini menautkan *ecosystem orchestration*, *adaptive governance*, dan *knowledge co-evolution* agar keputusan publik responsif terhadap umpan balik sosial, sekaligus menjamin partisipasi komunitas yang bermakna. Dengan penegasan ini, fokus orasi diarahkan pada

mekanisme yang membuat sistem bergerak serempak—bukan pada penambahan program—untuk memperkuat keadilan sosial dalam konteks Indonesia.

MOE lahir dari kesenjangan tata kelola kesejahteraan sosial yang masih fragmentaris, sektoral, dan kurang partisipatif, sehingga memunculkan defisit keadilan sosial. Kebaruan model ini terletak pada sintesis *ecosystem orchestration-adaptive governance-knowledge co-evolution*, yang diperkuat oleh *intermediary orchestration* (aktor *middleground*) dan empat pilar operasional—komunitas, kolaborasi, nilai lokal, dan transformasi digital yang berkeadilan—sebagai “mesin” penggerak lintas level. Kontribusinya tidak hanya memperkaya teori orkestrasi sosial berbasis komunitas, tetapi juga menawarkan peta jalan kebijakan menuju *shared governance* yang inklusif dan adaptif, melalui antara lain: RI-EKSOSNAS, Unit Orkestrasi Sosial, redesain program, dan pembangunan infrastruktur digital sosial.

Pada orasi ini akan disampaikan *state of the art* ilmu kesejahteraan sosial yang tengah bergeser dari paradigma normatif yang didominasi negara menuju ekosistem kolaboratif yang adaptif, partisipatif, dan berbasis komunitas. Kesejahteraan kini dipahami sebagai hasil proses sosial yang melibatkan *co-creation* nilai antara negara, komunitas lokal, dan jejaring global.

Tantangan kontemporer—penuaan populasi, kemiskinan struktural, migrasi eksploitatif, krisis lingkungan, hingga disrupsi digital—menuntut pendekatan orkestratif yang mampu menyinergikan struktur makro dan dinamika mikro. Penelitian mutakhir menekankan peran *middleground actors* sebagai penghubung kebijakan nasional dan praktik lokal, dengan komunitas sebagai subjek utama pembangunan. Prinsip *co-creation of value* menjadi fondasi solusi yang kontekstual,

inklusif, dan berkelanjutan, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia.

Transformasi digital menghadirkan peluang strategis bagi penguatan orkestrasi kesejahteraan sosial melalui pemanfaatan *big data*, sistem informasi sosial, dan kecerdasan buatan. Namun demikian, peluang tersebut perlu diiringi komitmen normatif terhadap prinsip keadilan sosial guna mengantisipasi potensi eksklusi digital. Dalam perspektif teori pembangunan kontemporer, keberhasilan inovasi sosial sangat ditentukan oleh kemampuan suatu masyarakat mengartikulasikan solusi yang berakar pada kapasitas dan dinamika internalnya. Di sisi lain, pendekatan dominan yang berkembang di negara-negara Global North tidak selalu sepenuhnya kontekstual dengan kompleksitas sosial di negara berkembang. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan model *endogenous*—yakni model yang bertumpu pada dinamika internal masyarakat, mencakup nilai-nilai lokal, praktik kelembagaan, dan konfigurasi sosial yang hidup di dalamnya. Dalam kerangka tersebut, MOE yang diusulkan menawarkan suatu kerangka arsitektural kolaboratif lintas sektor yang mengintegrasikan dimensi struktural, kultural, digital, dan spiritual, dengan fokus pada delapan kelompok sosial strategis di Indonesia. Dengan demikian, model ini tidak hanya dimaksudkan sebagai kerangka analitis, tetapi juga sebagai landasan konseptual bagi penguatan tata kelola kesejahteraan sosial yang lebih inklusif, adaptif, dan kontekstual dalam menghadapi transformasi sosial di era digital.

Untuk memudahkan pembacaan, MOE dalam orasi ini dimaknai sebagai kerangka tata kelola kesejahteraan sosial yang dirancang untuk melayani keragaman isu dan kelompok rentan secara terpadu. Inti model ini bukan menambah program baru, melainkan menata ulang cara kerja sistem: menyatukan aktor, data,

dan proses pembelajaran kebijakan agar intervensi sosial tidak terfragmentasi. Secara operasional, model bekerja melalui tiga mekanisme yang saling menguatkan—*ecosystem orchestration* (penghubung dan pengarah jejaring), *adaptive governance* (keputusan responsif berbasis umpan balik), dan *knowledge co-evolution* (ko-kreasi pengetahuan bersama komunitas)—sehingga kebijakan sosial menjadi lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Secara teoretis, model ini memperkaya literatur orkestrasi sosial dengan perspektif komunitas; secara praktis, model ini menawarkan strategi kebijakan inklusif yang tangguh menghadapi guncangan sistemik. Dengan demikian, *state of the art* kesejahteraan sosial Indonesia ditandai oleh transisi menuju pendekatan holistik, partisipatif, dan berkeadilan, di mana MOE menjadi kontribusi orisinal bagi pengembangan keilmuan dan arah kebijakan sosial masa depan.

Perlu ditegaskan, MOE tidak identik dengan *one-stop service* (layanan satu pintu) ataupun sinonim dari program tertentu (misalnya SLRT/Puskesmas). Model ini merupakan arsitektur tata kelola, yang dapat memanfaatkan SLRT/Puskesmas sebagai simpul operasional pada level meso, tetapi cakupannya lebih luas karena mengatur orkestrasi lintas sektor, lintas level, dan lintas siklus hidup—dengan komunitas sebagai produsen kesejahteraan sosial, bukan sekadar penerima manfaat. Dengan batasan ini, kebaruan model terletak bukan pada “label”, melainkan pada mekanisme orkestrasi dan pembelajaran kebijakan yang memungkinkan sistem bergerak serempak menghadapi kerentanan multidimensi.

Orasi ini diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah akademik mengenai transformasi kesejahteraan sosial, tetapi juga menyalakan optimisme kolektif bahwa perubahan dapat diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor yang berkeadilan

dan kontekstual. Dengan memadukan kekuatan pengetahuan, nilai-nilai lokal, dan inovasi praktis, Indonesia memiliki peluang besar untuk merumuskan kebijakan yang adaptif sekaligus membangun ketahanan sosial yang inklusif. Pada akhirnya, kesejahteraan sosial bukan hanya wacana ilmiah, melainkan agenda bersama yang hidup, berdenyut, dan terus tumbuh dalam denyut nadi masyarakat—menuju Indonesia yang lebih adil, tangguh, dan berdaya.



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang dan Kerangka Masalah

Perubahan sosial yang berlangsung cepat di Indonesia dewasa ini telah memunculkan berbagai tantangan struktural, multidimensional, dan lintas generasi (Kementerian PPN/Bappenas, 2024; BPS, 2024; UNDP & OPHI, 2024; BPS, 2025). Ketimpangan spasial antarwilayah, migrasi yang tidak aman, fragmentasi layanan dasar, dan lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan menegaskan urgensi pembaruan tata kelola kesejahteraan sosial yang melampaui pendekatan sektoral dan birokrasi konvensional (Kementerian PPN/Bappenas, 2020; UNHCR & IOM, 2024; World Bank, 2020; Ollivaud, 2017). Dunia bergerak menuju kompleksitas dan interdependensi yang semakin tinggi, sehingga menuntut model kebijakan sosial yang kolaboratif, inklusif, dan adaptif.

Berangkat dari konteks tersebut, masalah utama yang diangkat dalam orasi ini adalah masih kuatnya pola tata kelola kesejahteraan sosial yang sektoral, prosedural, dan terfragmentasi, sehingga respons terhadap kerentanan kerap lambat, tumpang tindih, dan kurang peka terhadap dinamika lokal. Kesenjangan teoretik–praktik muncul ketika berbagai pendekatan mutakhir—orkestrasi, tata kelola adaptif, dan ko-kreasi—telah berkembang dalam literatur, tetapi belum dirangkai menjadi kerangka operasional yang kontekstual bagi Indonesia dan delapan kelompok sosial strategis. Oleh karena itu, orasi ini menempatkan Model Orkestrasi Ekosistem (MOE) sebagai pendekatan tata kelola yang menjawab problem fragmentasi

melalui penyelarasan lintas aktor, lintas level, dan lintas siklus hidup. *Gap* utama yang hendak ditutup bukan semata kekurangan program, melainkan ketiadaan mekanisme operasional yang mampu menghubungkan bukti empiris, pengetahuan komunitas, dan desain kebijakan dalam satu siklus pembelajaran berkelanjutan. Dalam kerangka ini, *ecosystem orchestration* berfungsi sebagai payung kerja untuk mengoordinasikan jejaring, *adaptive governance* memastikan keputusan responsif berbasis umpan balik, dan *knowledge co-evolution* menegaskan ko-kreasi pengetahuan bersama komunitas. Dengan demikian, tujuan orasi ini adalah merumuskan MOE sebagai arsitektur tata kelola yang dapat diuji, disempurnakan, dan direplikasi tanpa ketergantungan pada proyek atau figur tertentu. Kontribusi yang ditawarkan mencakup penguatan teori (mekanisme orkestratif), penguatan kebijakan (*policy pathway*), dan penguatan praktik sosial (pengorganisasian komunitas berbasis pengetahuan) dalam konteks Indonesia. Kesenjangan inilah yang menjadi titik tolak orasi ini, yaitu perlunya suatu kerangka orkestrasi tata kelola kesejahteraan sosial yang mampu menyelaraskan aktor, pengetahuan, dan kebijakan secara sistemik.

Dalam konteks tersebut, orkestrasi strategi transformasional dipahami sebagai pendekatan sistemik untuk menyatukan aktor lintas sektor dan lintas skala dalam membangun ekosistem kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Konsep orkestrasi dalam kebijakan sosial bukan sekadar metafora, melainkan kerangka kerja strategis yang menjawab kebutuhan akan kepemimpinan kolaboratif serta kemampuan menyinergikan inovasi, birokrasi, dan kekuatan komunitas.

Konsep orkestrasi—dalam ekosistem yang memiliki *hub*—dioperasionalkan melalui lima mekanisme utama, yaitu: (1) koordinasi aktor; (2) penyelarasan tujuan; (3) fasilitasi

inovasi; (4) penguatan kapabilitas; dan (5) pembentukan tata kelola bersama. Mekanisme tersebut selaras dengan mekanisme orkestrasi tingkat *hub* (*enablers, governance, partner management, nurturing, dan co-specialization*) serta menuntut peran orkestrator individu di *innovation hub* yang bekerja lintas level (operasional–taktis–strategis) untuk menjembatani aktor dan menyelaraskan tujuan (Burström et al., 2023; Bittencourt et al., 2025).

Kesenjangan tata kelola tersebut menjadi semakin relevan ketika dibaca dalam kerangka mandat hukum nasional. Dalam konteks Indonesia, mandat konstitusional dan kerangka regulasi—termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial—telah menegaskan kesejahteraan sebagai tanggung jawab negara sekaligus ruang partisipasi masyarakat. Namun demikian, capaian mandat tersebut kerap terhambat oleh fragmentasi program, silo antar-kementerian/ lembaga, ketimpangan kapasitas daerah, dan lemahnya integrasi data dan layanan, sehingga kelompok rentan mengalami “celah perlindungan” meskipun berbagai intervensi telah dilakukan. Di titik inilah MOE diposisikan: bukan untuk menggantikan mandat hukum, melainkan menawarkan mekanisme orkestratif agar mandat tersebut lebih tercapai melalui penyelarasan tujuan lintas sektor, penguatan simpul kolaborasi pada level meso, serta pembelajaran kebijakan berbasis bukti dan pengetahuan komunitas.

Sebagai pemimpin atau orkestrator ekosistem sosial, aktor kunci diharapkan mampu menjembatani dan mengintegrasikan beragam sumber daya, peran, dan nilai—sering kali melalui *middleground* sebagai platform perantara yang mengorkestrasi hubungan antara aktor formal (*upperground*) dan komunitas (*underground*) (Ozor, Ronde, Tung, & Boyer, 2024). Kapasitas

ini menuntut kepemimpinan adaptif, orkestrasi dan manajemen pengetahuan lintas aktor, *sensemaking* transformatif, serta keselarasan dengan mekanisme orkestrasi tingkat *hub—enablers, governance, partner management, co-specialization*, dan *nurturing*—dan peran orkestrator individu yang bekerja lintas level (Burström et al., 2023; Bittencourt et al., 2025).

Selama lebih dari dua dekade, berbagai kajian menunjukkan bahwa keluarga pekerja sangat rentan ketika terjadi guncangan ekonomi, seperti pemutusan hubungan kerja, anak putus sekolah, dan beban ganda perempuan. Transformasi pedesaan dan migrasi—termasuk migrasi sementara—memicu ketidakpastian penghidupan; kelompok minoritas dan masyarakat adat juga kerap mengalami eksklusi; sementara kemiskinan bersifat multidimensi dan lintas generasi (Nuryana, 1996; 1998a; 2000; 2016a–c).

Untuk merespons permasalahan tersebut, telah dikembangkan berbagai model layanan sosial berbasis komunitas, pemberdayaan ekonomi, serta inovasi teknologi sosial—mulai dari rehabilitasi disabilitas berbasis komunitas, KUBE, pendekatan *Elderly Program Innovation* (EPI) dalam ATENSI lanjut usia, hingga uji teknologi sosial seperti robot terapi yang meningkatkan keterlibatan dan kualitas perawatan (Nuryana, 2003a; 2005a; 2020b; 2020c; 2022c–e). Temuan-temuan ini menegaskan bahwa tantangan kerentanan tidak dapat diatasi secara parsial, melainkan memerlukan orkestrasi tata kelola lintas aktor yang mampu mengintegrasikan layanan dan perlindungan secara berkelanjutan.

Migrasi tenaga kerja dan perdagangan orang juga mengungkapkan lemahnya perlindungan negara serta kompleksitas reintegrasi sosial migran (Nuryana & Nainggolan, 2004g; Nuryana, 2004j; Sutaat & Nuryana, 2005c; Nuryana,

2005b). Kajian pendidikan multikultural dan rekonsiliasi pascakonflik menunjukkan pentingnya peran komunitas dalam merajut kembali kohesi sosial (Nuryana, 2003j; 2003m; Nuryana, 2017c). Evaluasi program bantuan sosial seperti PKH dan Program Sembako juga menegaskan perlunya akurasi data dan dukungan psikososial agar intervensi benar-benar efektif memulihkan martabat penerima manfaat (Jayaputra et al., 2021c; Arifin et al., 2021d; Nuryana [Ed.], 1999c).

Bertolak dari berbagai kajian tentang kerentanan struktural kelompok rentan (Nuryana, 2000; 2004f; 2016a, 2016c), lemahnya sinergi kelembagaan sosial (Nuryana et al., 2003; 2003p; 2004b), serta terbatasnya ruang partisipasi komunitas dalam desain kebijakan (Nuryana, 1998c; 2003g; 2003i; 2005d), MOE untuk Tata Kelola Kesejahteraan Sosial Inklusif di Indonesia diajukan sebagai usulan strategis untuk mengatasi kerentanan masyarakat secara sistemik. Berangkat dari konsistensi pemikiran dan temuan empiris tersebut, topik orasi ini hadir sebagai jawaban strategis atas permasalahan tata kelola kesejahteraan sosial di Indonesia.

Buku orasi ini tidak hanya mendokumentasikan pemikiran akademik, tetapi juga memproklamasikan kerangka strategis transformatif untuk mengorkestrasi kekuatan komunitas, birokrasi, dan inovasi sosial ke dalam sistem kesejahteraan sosial yang adaptif dan berkelanjutan.

Selaras dengan pendekatan ekosistem, berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi sosial sangat dipengaruhi oleh mekanisme kolaboratif, ruang intermediasi (*middleground*), dan struktur tata kelola *multilevel* (Ozor et al., 2024; Mann et al., 2021). Konteks lokal menuntut pengelolaan hubungan lintas aktor yang tidak hierarkis, melainkan saling melengkapi melalui sinergi peran dan fungsi. Pada skala mikro,

inovasi kebijakan juga membutuhkan kerangka *co-creation* dan *co-evolution* pengetahuan sebagai fondasi tata kelola kolaboratif (Ferenhof & de Sousa, 2021).

Pendekatan ini menuntut orkestrasi kapasitas, sumber daya digital, dan penguatan komunitas sebagai basis penggerak transformasi (Shirish et al., 2025; Zeng, 2022). Dalam perspektif keberlanjutan, model ekosistem terintegrasi mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan sebagaimana ditunjukkan oleh studi dalam rantai pasok pangan dan konstruksi sirkular (De et al., 2024; Havinga et al., 2023). Strategi transformasional yang berhasil adalah strategi yang mengoordinasikan aktor-aktor yang saling bergantung untuk menyeimbangkan tujuan daya saing dengan keberlanjutan sosial dan ketahanan lingkungan melalui tata kelola transformatif yang menjaga keseimbangan fitur ekosistem—keragaman, konektivitas, polisentrisitas, redundansi, dan arah (Könnölä et al., 2021; Wang et al., 2024; van Erp et al., 2024). Bukti empiris di tingkat organisasi juga menunjukkan bahwa kepemimpinan lingkungan transformatif dan CSR berkontribusi pada keunggulan bersaing sekaligus meningkatkan kinerja berkelanjutan (Ramírez-Altamirano et al., 2024).

Struktur buku ini terdiri atas tujuh bab yang disusun secara sistematis untuk menghadirkan bangunan pemikiran yang utuh dari hulu ke hilir. Bab I menguraikan konteks perubahan sosial dan urgensi orkestrasi strategi transformasional. Bab II mendalami dinamika keilmuan kesejahteraan sosial dan transisi dari paradigma konvensional menuju pendekatan ekosistem yang inovatif dan berkelanjutan. Bab III terdiri atas dua bagian: bagian pertama memetakan kerentanan struktural delapan kelompok sosial strategis dalam ekosistem Indonesia serta dinamika spasial, ekonomi, dan kultural; bagian kedua merumuskan

model konseptual MOE sebagai sintesis antara ekosistem, tata kelola adaptif, dan *knowledge co-evolution*. Bab IV menjelaskan perumusan MOE sebagai kontribusi ilmiah baru dalam tata kelola kesejahteraan sosial. Bab V membahas dinamika strategis dan transformatif model tersebut serta implikasinya bagi pemerintah dan masyarakat. Bab VI menyajikan rekomendasi kebijakan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Bab VII, sebagai penutup, merefleksikan perjalanan keilmuan dan komitmen terhadap transformasi sosial berbasis komunitas.

Berangkat dari pembacaan kritis atas dinamika tersebut, orasi ini tidak hanya memetakan perubahan paradigma dan tantangan tata kelola kesejahteraan sosial, tetapi juga merumuskan suatu kerangka konseptual yang merepresentasikan akumulasi pemikiran dan temuan empiris selama lebih dari tiga dekade. Untuk memperjelas esensi kontribusi ilmiah yang ditawarkan, bagian berikut secara ringkas merumuskan sari pati dan kebaruan (*novelty*) MOE sebagai landasan argumentatif bagi pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

## **B. Sari Pati dan Kebaruan Model Orkestrasi Ekosistem**

Bagian ini merangkum esensi dan kebaruan konseptual karya ilmiah yang akan dibuktikan pada bab-bab berikutnya. Karya ini berangkat dari pembacaan kritis atas tata kelola kesejahteraan sosial di Indonesia yang masih ditandai oleh fragmentasi sektoral, silo kelembagaan, dan lemahnya keterhubungan antara kebijakan pada level makro, pengaturan dan layanan pada level meso, serta realitas keluarga dan komunitas pada level mikro. Berbagai pendekatan mutakhir—seperti tata kelola kolaboratif, *co-creation* layanan publik, dan pendekatan kapabilitas—telah memperkaya kebijakan sosial, namun umumnya berkembang secara parsial dan belum terintegrasi dalam kerangka orkestrasi

tata kelola yang operasional, adaptif, dan kontekstual bagi negara berkembang. Dengan demikian, kesenjangan ilmiah yang direspons karya ini bukan terletak pada ketiadaan program, melainkan pada absennya mekanisme yang mampu menyelaraskan aktor, pengetahuan, dan pembelajaran kebijakan lintas sektor dan lintas level secara berkelanjutan.

Sebagai respons atas kesenjangan tersebut, karya ini merumuskan MOE sebagai inovasi konseptual dalam tata kelola kesejahteraan sosial. Model ini tidak dimaksudkan sebagai program atau layanan baru, melainkan sebagai arsitektur tata kelola yang menata ulang cara kerja sistem kesejahteraan sosial agar lebih terpadu, adaptif, dan inklusif. Secara konseptual, model ini merupakan sintesis dari *ecosystem orchestration*, *adaptive governance*, dan *knowledge co-evolution* dalam satu kerangka orkestrasi lintas level. Kesejahteraan sosial dipahami sebagai hasil dari proses sosial yang diorkestrasi, dengan komunitas sebagai produsen utama kesejahteraan dan negara berperan sebagai *enabler* yang memfasilitasi, mengarahkan, dan menjaga keberlanjutan kolaborasi lintas aktor.

Kebaruan utama model ini terletak pada perumusan mekanisme *intermediary orchestration* sebagai inti orkestrasi pada level meso. Konsep ini melampaui peran perantara jaringan atau *boundary organization* dengan menempatkan fungsi orkestratif yang secara sadar dirancang untuk menyelaraskan tujuan lintas aktor, mengelola relasi kuasa dan potensi konflik kepentingan, membangun aturan kolaborasi, serta mengintegrasikan pengetahuan dan pengalaman hidup komunitas ke dalam seluruh siklus kebijakan. Melalui mekanisme ini, orkestrasi kesejahteraan sosial tidak bergantung

pada figur atau proyek tertentu, melainkan dapat dilembagakan sebagai cara kerja sistem yang aplikatif dan replikatif.

Secara teoretis, MOE berkontribusi pada pengayaan literatur kesejahteraan sosial dan tata kelola kebijakan publik melalui pengembangan kerangka orkestrasi sosial berbasis komunitas dalam konteks *Global South*. Secara kebijakan, model ini menawarkan arah transformasi menuju *shared governance* kesejahteraan sosial melalui penguatan simpul orkestrasi pada level meso, integrasi pembelajaran kebijakan berbasis bukti dan pengetahuan komunitas, serta pengembangan transformasi digital sosial yang berkeadilan. Dengan demikian, model ini berfungsi tidak hanya sebagai konstruksi teoretis, tetapi sebagai arsitektur tata kelola yang memungkinkan sistem kesejahteraan sosial bergerak secara serempak, adaptif, dan berorientasi pada keadilan sosial.



## **II. DINAMIKA KEILMUAN DAN TRANSFORMASI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL: DARI PARADIGMA KONVENSIONAL MENUJU EKOSISTEM INOVATIF DAN BERKELANJUTAN**

Bab ini merupakan refleksi kritis atas dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesejahteraan sosial yang berlangsung dalam lanskap sosial, politik, dan kelembagaan yang kompleks. Pergeseran paradigma tidak dipahami sebagai proses linier, melainkan sebagai transformasi yang kerap diwarnai ketegangan, resistensi, serta paradoks kebijakan, sebagaimana dialami langsung penulis dalam perumusan kebijakan dan praktik lapangan.

Sebagai disiplin multidisiplin yang berakar pada prinsip keadilan sosial dan keberpihakan pada kelompok rentan, ilmu kesejahteraan sosial terus berevolusi untuk merespons disrupsi teknologi, krisis lingkungan, dan perubahan sosial global. Transformasi ini menuntut pergeseran mendasar dari pendekatan karitatif menuju sistem kolaboratif yang menekankan pemberdayaan, partisipasi, serta inovasi berbasis pengetahuan, baik pada tataran epistemologis maupun praktis.

Untuk memperlihatkan evolusi kontribusi keilmuan peneliti dan akumulasinya hingga perumusan MOE, Bab ini menyajikan pemetaan dalam Tabel 1. Pemetaan tersebut menampilkan keterkaitan antar-periode kontribusi—mulai dari landasan konseptual, pengembangan pendekatan, hingga integrasi

temuan—yang secara bertahap membentuk *roadmap* menuju MOE sebagai sintesis capaian riset secara utuh.

**Tabel 1.** Evolusi Ilmu Kesejahteraan Sosial: Dulu–Sekarang–Depan (Nasional, Regional, Internasional)

Periode evolusi ilmu	Fokus problem & konteks	Inovasi konseptual/ empiris peneliti (arah kontribusi)	Contoh karya kunci (sitasi contoh)	Akumulasi menuju Orkestrasi Ekosistem
1990–1999 (Charity Based)	Kerentanan sosial dipahami terutama sebagai “kekurangan” dan ditangani secara karitatif; lemahnya dialog sosial dan mekanisme rekonsiliasi berbasis solidaritas	Diagnostik kerentanan dan dinamika sosial; penegasan perlunya rekayasa sosial dan basis komunitas sebagai simpul perlindungan sosial	(Nuryana, 1996; 1998c)	Fondasi pemetaan masalah: menunjukkan keterbatasan pendekatan sektoral/ karitatif dan kebutuhan model yang menguatkan komunitas
2000–2025 (Capability Approach)	Peralihan menuju hak warga, penguatan kapabilitas, pemberdayaan, dan penguatan layanan; namun masih menghadapi fragmentasi kebijakan dan layanan	Penguatan kerangka multilevel: menjembatani makro–mikro melalui tata kelola partisipatif; penguatan bukti lapangan sebagai basis sintesis	(Nuryana, 2002b; 2003i; 2005d; 2019a)	Fondasi mekanisme: memperlihatkan perlunya ruang intermediasi/ meso untuk menyambungkan kebijakan dan praktik komunitas

Periode evolusi ilmu	Fokus problem & konteks	Inovasi konseptual/ empiris peneliti (arah kontribusi)	Contoh karya kunci (sitasi contoh)	Akumulasi menuju Orkestrasi Ekosistem
2025–2045 (Ekosistem Inovatif)	Disrupsi digital, kebutuhan orkestrasi lintas aktor, serta tuntutan <i>adaptive governance</i> dan <i>knowledge co-evolution</i>	Sintesis orkestrasi ekosistem, tata kelola adaptif, dan evolusi pengetahuan; penegasan komunitas sebagai produsen kesejahteraan sosial	(Nuryana, 2020c; 2022a; 2022f; 2025)	Puncak kontribusi: Model Orkestrasi Ekosistem sebagai arsitektur kolaboratif yang replikatif dan kontekstual

Sumber: *Charity-based* (Wilensky & Lebeaux, 1965); *capability approach* (Sen, 2009), Alkire (2015), Stewart (2013).

Pemetaan di atas memperlihatkan bahwa MOE merupakan hasil pendewasaan kontribusi: dari pembacaan problem yang berlapis, menuju perumusan mekanisme jembatan (*bridge mechanism*), hingga penguatan desain orkestrasi lintas sektor dan lintas level.

## A. Evolusi Paradigma dan Perkembangan Teoretis

Subbab ini mengulas evolusi paradigma IPTEK kesejahteraan sosial dari pendekatan karitatif dan sektoral menuju kerangka perlindungan dan pemberdayaan sosial yang lebih adaptif.

Pada awal periode (1990–1999) di Indonesia, praktik kesejahteraan sosial didominasi paradigma residual dan *charity-based*. Paradigma ini berakar pada Wilensky & Lebeaux (1965)—rujukan teoretis yang memandang kesejahteraan sosial sebagai “jaring pengaman” ketika pasar dan keluarga gagal—sementara periode 1990–1999 merujuk pada masa dominansinya dalam praktik kebijakan. Dalam kerangka ini, negara berperan

terutama sebagai pelindung pasif, dengan penekanan pada tanggung jawab individu dan peran organisasi nonpemerintah (lihat Wilensky & Lebeaux, 1965).

Di Indonesia, paradigma kesejahteraan sosial pascakemerdekaan awalnya berakar pada model residual dan berbasis amal, ketika negara hadir sebagai pelindung pasif (Sumarto, 2017). Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia mengadopsi pendekatan serupa, dengan negara lebih berfokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur, sementara peran dalam penyediaan layanan sosial terbatas pada organisasi-organisasi amal dan masyarakat. Akibatnya, tanggung jawab kesejahteraan lebih dipandang sebagai urusan individu/komunitas ketimbang negara (Sumarto, 2017).

Dalam konteks Indonesia saat ini, kajian pembiayaan dan tata kelola layanan menunjukkan bahwa orientasi kebijakan masih cenderung *residual*—dengan porsi pembiayaan pencegahan lebih kecil dibandingkan kuratif—sehingga ruang untuk pelayanan pencegahan, intervensi dini, dan perlindungan belum optimal (Fuady et al., 2024; Sambodo et al., 2021; Cheng et al., 2022). Keberlanjutan lembaga kesejahteraan sosial juga kerap tidak terjamin karena ketergantungan pada dukungan fiskal pemerintah dan aliran pendanaan program yang tidak stabil, terutama untuk fungsi promotif-preventif (Fuady et al., 2024; Asante et al., 2023). Ke depan, pemerintah dapat memperluas jangkauan pelayanan melalui melibatkan komunitas—dengan negara berperan sebagai fasilitator/ stimulan—sebagaimana ditunjukkan oleh pengembangan intervensi berbasis komunitas yang *co-design* dan *peer-led* di Indonesia (Fuady et al., 2025).

Seiring waktu, paradigma institusional muncul, yang menegaskan kesejahteraan sebagai hak warga dan tanggung jawab kolektif. Pemikiran ini didukung oleh *capability approach*

dari Sen (2009), Alkire (2015), dan Stewart (2013), yang menekankan kemampuan nyata individu untuk mewujudkan fungsi sosial yang bernilai.

## **B. Disrupsi Digital dan Transformasi Teknologi Sosial**

Disrupsi digital dalam kesejahteraan sosial tidak semata-mata bersifat teknologis, tetapi mengubah cara aktor sosial berinteraksi, belajar, dan mengelola intervensi kesejahteraan sosial.

Di tingkat internasional, konsep ini berinteraksi dengan kebijakan global, misalnya *United Nations Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menekankan inklusi sosial dan pemberdayaan masyarakat sebagai tolok ukur kemajuan kesejahteraan (United Nations, 2015). Kerangka *capability approach* yang dikemukakan oleh Amartya Sen dan dikembangkan oleh Robeyns (2005) dan Alkire (2005) menegaskan bahwa kesejahteraan bukan hanya tentang sumber daya, melainkan tentang kemampuan nyata individu untuk melakukan dan menjadi apa yang mereka hargai.

Di Indonesia, pendekatan ini tampak pada Program Keluarga Harapan (PKH) yang secara regulatif mengintegrasikan prasyarat kesehatan–pendidikan dan didorong oleh intervensi penguatan penghidupan. Bukti eksperimental menunjukkan PKH meningkatkan berbagai indikator kesehatan dan pendidikan, sementara sejumlah studi menekankan perlunya *productive inclusion* dan kewirausahaan sosial agar keluarga benar-benar mandiri (Kementerian Sosial RI, 2018; Cahyadi et al., 2020;

Setiawan et al., 2021; SMERU–MAHKOTA, 2020; Sumarto, 2020).

Di Indonesia, Kementerian Sosial memanfaatkan platform digital untuk pemetaan keluarga miskin dan distribusi bantuan tunai secara lebih tepat sasaran. Di ASEAN, *digital inclusion* menjadi agenda lintas negara bagi anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas (ASEAN Secretariat, 2022). OECD (2023) menekankan bahwa sistem digital harus etis dan inklusif agar tidak memperkuat ketimpangan.

Riset empiris menunjukkan bahwa algoritma cerdas meningkatkan akurasi penargetan dan transparansi distribusi bantuan sosial (Lepri et al., 2016; Levy et al., 2021). Shirish et al. (2024) menegaskan pentingnya transformasi digital berbasis pengetahuan untuk memperluas akses layanan secara partisipatif.

### **C. Paradigma Baru: Ekosistem Inovatif dan Orkestrasi Sosial**

Paradigma baru IPTEK kesejahteraan sosial menandai pergeseran dari tata kelola hierarkis menuju ekosistem kolaboratif yang adaptif, dengan implikasi langsung pada perubahan peran aktor dan mekanisme transisi kebijakan. Namun, literatur kritis mengingatkan bahwa pendekatan orkestrasi ekosistem juga mengandung risiko, seperti depolitisasi isu sosial, penguatan *managerialism*, dan kooptasi komunitas, terutama apabila orkestrasi direduksi menjadi koordinasi teknokratis yang mengabaikan relasi kuasa.

Merespons tantangan tersebut, MOE dalam orasi ini dirancang secara reflektif dengan menempatkan *intermediary orchestration*, pembelajaran kebijakan berbasis komunitas, dan penguatan posisi tawar aktor lokal sebagai mekanisme

penyangga. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa orkestrasi ekosistem tetap berlandaskan keadilan sosial dan tidak terlepas dari nilai pemberdayaan yang menjadi inti ilmu kesejahteraan sosial.

Pendekatan *ecosystem orchestration* menjadi arus utama dalam transformasi ilmu kesejahteraan sosial. Model ini menekankan kolaborasi lintas aktor—negara, komunitas, swasta, dan akademisi—untuk membangun sistem sosial adaptif dan berkelanjutan (De et al., 2024).

Beberapa temuan terkini menunjukkan hal berikut: (1) Burström et al. (2023) menegaskan bahwa keberhasilan ekosistem sosial ditentukan oleh kapasitas aktor kunci dalam menyinergikan interaksi, pengetahuan, dan sumber daya; (2) Ozor et al. (2024) menunjukkan bahwa *middleground actors* menjadi jembatan antara inovasi lokal dan kebijakan makro yang terfragmentasi; dan (3) Ferenhof & de Sousa (2022) menempatkan *co-creation* dan *knowledge co-evolution* sebagai fondasi orkestrasi sosial berbasis pengetahuan.

Di tingkat nasional, integrasi ekosistem sosial dijalankan melalui SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu)–Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial) dan pengelolaan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)/ SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial–*Next Generation*). Inisiatif ini secara eksplisit mendorong kemitraan pemerintah–dunia usaha–masyarakat melalui pemakaian *dashboard* di pusat/daerah dan partisipasi aktif warga. Implementasinya tampak di kota-kota besar (misalnya Bandung melalui Puskesos) dan kolaborasi pemerintah– swasta–komunitas seperti KSBB di DKI Jakarta (Kementerian Sosial RI, 2020; Kementerian Sosial RI, 2024;

Satu Data Indonesia, n.d.; Kardeti, 2020; Jakarta Smart City, 2020).

Secara internasional, model *One-Stop Guidance Center* Finlandia menunjukkan tingkat kepuasan penerima manfaat yang sangat tinggi (misalnya, Finlandia/Ohjaamo: rata-rata 9,37/10 pada Survei Umpan Balik Nasional 2024) dan dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi melalui penggabungan layanan lintas lembaga; contoh lain adalah NAV di Norwegia (Job Market Finland/KEHA Centre, 2025; Læg Reid & Rykkja, 2014).

Pelajaran dari *One-Stop Guidance Center* Finlandia penting untuk menegaskan nilai integrasi layanan dan pengalaman pengguna (*service integration*) dalam meningkatkan akses dan kepuasan penerima manfaat. Namun, MOE yang diajukan di sini memiliki fokus yang berbeda: bukan semata mengonsolidasikan layanan dalam satu pintu, melainkan membangun arsitektur orkestrasi lintas aktor yang menyatukan data, pembelajaran kebijakan, dan *co-creation* solusi bersama komunitas. Dengan kata lain, *one-stop service* merupakan salah satu bentuk pengaturan layanan, sedangkan MOE adalah kerangka tata kelola ekosistem yang dapat memayungi berbagai bentuk pengaturan layanan (termasuk SLRT/Puskesmas) agar tidak berjalan sendiri-sendiri dan tetap berorientasi pada keadilan sosial.

#### **D. Tantangan Epistemologis dan Agenda Keilmuan Masa Depan**

Tantangan epistemologis dalam IPTEK kesejahteraan sosial muncul dari ketegangan antara pendekatan normatif, bukti empiris, dan konteks sosial yang beragam.

Meskipun kemajuan signifikan telah dicapai—terutama dalam penguatan basis teori pembangunan manusia, adopsi pendekatan digital dalam kebijakan sosial, dan meningkatnya kolaborasi lintas disiplin dalam studi kesejahteraan—tantangan tetap ada, yaitu dominasi teori Barat, keterbatasan data lokal, dan jarak antara ilmu dan kebijakan. Kemajuan ini tampak pada pergeseran paradigma dari pendekatan karitatif menuju *capability-based welfare* yang menekankan pemberdayaan, serta meningkatnya praktik riset terapan yang mendukung kebijakan berbasis bukti (Handayani, 2020; Nugroho, 2023; UNDP, 2022).

Agenda transformatif yang perlu diperkuat meliputi: (1) pembaruan metodologi riset yang sensitif konteks—mengacu pada *realist evaluation* (panduan resmi dan standar pelaporan) dan kerangka implementasi seperti CFIR (HM Treasury, 2020; Wong et al., 2016; Damschroder et al., 2009); (2) literasi digital bagi SDM kesejahteraan sosial sesuai kerangka kompetensi global dan standar teknologi profesi (UNESCO, 2018; National Association of Social Workers et al., 2017); dan (3) pembangunan ekosistem pengetahuan/*knowledge brokering* untuk menjembatani riset–kebijakan (Bornbaum et al., 2015; Cairney & Oliver, 2017; Oliver et al., 2014).

Schultz et al. (2015) menekankan bahwa tata kelola adaptif memerlukan pembelajaran sosial berkelanjutan, fleksibilitas kelembagaan, dan koordinasi polisentris lintas aktor. Integrasi pengetahuan ahli dan partisipasi masyarakat menjadi mekanisme *co-creation* pengetahuan, sehingga kebijakan sosial bukan hanya berbasis data, tetapi juga mengorkestrasi teknologi, kearifan lokal, dan kekuatan komunitas.

## E. Arah Transformasi Ilmu Kesejahteraan Sosial

Subbab ini merumuskan arah transformasi IPTEK kesejahteraan sosial sebagai landasan bagi pembaruan kebijakan dan tata kelola kesejahteraan sosial. Transformasi ilmu kesejahteraan sosial menuntut pendekatan orkestratif yang menyinergikan *ecosystem orchestration* (Burström et al., 2023), *adaptive governance* (Schultz et al., 2015), dan *knowledge co-evolution* (Ferenhof & de Sousa, 2022). Kebijakan diposisikan sebagai proses iteratif berbasis umpan balik dan pembelajaran sosial, yang terkoordinasi secara polisentris lintas aktor.

MOE menempatkan komunitas sebagai produsen kesejahteraan sosial, sementara negara, academia, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil mengorkestrasi jejaring kolaboratif yang lentur untuk mengarahkan ekosistem kebijakan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Integrasi antara pengetahuan lokal, teknologi mutakhir, dan kolaborasi lintas aktor menegaskan *state of the art* transformasi ilmu kesejahteraan sosial di tingkat nasional, regional, dan internasional.

Refleksi penting dari evolusi tersebut adalah bahwa pergeseran dari pendekatan berbasis amal menuju pendekatan berbasis kapabilitas, lalu menuju ekosistem inovatif, tidak selalu berlangsung secara linier dan tidak otomatis lebih baik dalam setiap konteks. Pendekatan kapabilitas dapat terjebak menjadi individualistik apabila dipisahkan dari struktur ketimpangan; orkestrasi ekosistem dapat berubah teknokratis apabila mengabaikan relasi kuasa; dan digitalisasi dapat bersifat eksklusif apabila tidak dikawal oleh prinsip keadilan akses. Karena itu, posisi epistemologis orasi ini menekankan adaptasi selektif sekaligus rekonstruksi lokal: mengambil kekuatan teori global, namun merakitnya kembali melalui nilai-nilai lokal, praktik komunitas, dan realitas tata kelola Indonesia. Pada akhir

bab ini, MOE diajukan sebagai wujud sintesis tersebut, yaitu kerangka yang menjaga ilmu tetap kritis sekaligus operasional untuk mendorong perubahan.



### III. TRANSFORMASI EKOSISTEM KESEJAHTERAAN SOSIAL INDONESIA: DARI PETA KERENTANAN MENUJU MODEL TERPADU ORKESTRASI EKOSISTEM

MOE dirumuskan sebagai kerangka konseptual dan operasional untuk merespons fragmentasi tata kelola kesejahteraan sosial melalui penyelarasan aktor, subsistem, dan pembelajaran lintas level. Model ini berpijak pada pemahaman bahwa kesejahteraan sosial merupakan proses sosial yang memerlukan orkestrasi berkelanjutan, bukan sekadar akumulasi program sektoral. Oleh karena itu, model ini diposisikan sebagai arsitektur tata kelola yang menata ulang relasi negara, komunitas, dan aktor non-negara agar bekerja secara adaptif, kontekstual, dan berkeadilan.

Secara arsitektural, orkestrasi dipahami sebagai fungsi kolektif berjenjang. Negara menjalankan peran *meta-orchestrator* pada level makro melalui arah kebijakan dan regulasi. Pada level meso, *intermediary orchestration* berfungsi mengintegrasikan kebijakan, layanan, dan pengetahuan lintas sektor. Pada level mikro, komunitas berperan sebagai *co-orchestrator* melalui ko-kreasi layanan dan pembelajaran lokal. Interaksi antar subsistem—kebijakan, layanan, data sosial, inovasi, dan komunitas—bersifat resiprokal dan saling membentuk. Kebaruan model ini terletak pada penempatan *intermediary orchestration* sebagai inti operasional yang menjembatani praktik dan nilai lokal dengan kerangka kebijakan yang lebih luas.

Dalam konteks Indonesia, kesejahteraan sosial berkembang dalam dinamika struktural yang kompleks dan rentan terhadap perubahan sosial, ekonomi, politik, dan kultural. Berbagai studi

empiris menunjukkan adanya kerentanan sistemik di balik capaian pembangunan sosial, yang menegaskan bahwa persoalan kesejahteraan sosial menuntut pendekatan tata kelola yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Bab ini membahas transformasi ekosistem kesejahteraan sosial Indonesia melalui dua fokus utama: analisis peta kerentanan sebagai dasar pergeseran paradigma kebijakan, serta perumusan model terpadu orkestrasi kesejahteraan sosial yang mengintegrasikan riset, kajian teoretis, dan praktik lapangan dalam kerangka orkestrasi sosial yang inklusif dan berbasis komunitas.

## **A. Dinamika Struktural dan Peta Kerentanan dalam Ekosistem Kesejahteraan Sosial Indonesia**

Kerentanan sosial di Indonesia muncul sebagai konsekuensi kebijakan yang belum tepat sasaran dan pendekatan sektoral. Untuk memetakan kedalaman persoalan, delapan isu strategis dikelompokkan berdasarkan level: makro (struktur nasional dan sistemik), meso (kebijakan dan layanan), dan mikro (keluarga dan individu).

### **Level Makro: Sistemik dan Struktural**

#### **1) Fragmentasi Kelembagaan dan Kerapuhan Dialog Sosial**

Modernisasi ekonomi yang tidak diimbangi rekayasa sosial mendorong fragmentasi kelembagaan dan melemahnya modal sosial. Kelompok minoritas dan wilayah marjinal berisiko terpinggirkan karena dialog sosial yang lemah (Nuryana, 1996; 2002a–b; 2003g). Praktik CSR dan *community policing* belum menjadi kekuatan transformatif, sementara wilayah rawan konflik etnis kekurangan mekanisme rekon-

siliasi berbasis solidaritas (Nuryana [Ed.], 2003b; Sumarno et al., 2020a).

## 2) Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan Multidimensi

Kemiskinan di Indonesia bersifat multidimensi, lintas wilayah, lintas budaya, dan lintas generasi. Ketimpangan spasial, lemahnya institusi lokal, dan eksklusivitas kelompok rentan menunjukkan kegagalan kebijakan menyentuh akar masalah sosial (Nuryana, 1998a; 2016a–c; Nuryana et al., 2004c). Program seperti KUBE dan sistem “ngadon” menunjukkan efektivitas yang terbatas akibat lemahnya keberpihakan kebijakan dan kapasitas kelembagaan.

## 3) Migrasi Tidak Aman dan Eksploitasi

Mobilitas tenaga kerja yang tidak terlindungi menimbulkan eksploitasi, kekerasan berbasis gender, dan lemahnya perlindungan negara. *Shelter* di luar negeri kerap tidak manusiawi, mencerminkan lemahnya perlindungan diplomatik. Pada saat yang sama, migrasi pedesaan menimbulkan paradoks antara peluang ekonomi dan kohesi sosial (Nuryana & Nainggolan, 2004g; Sutaat & Nuryana, 2005c; Nuryana, 1998a; 2004j; 2005b).

## **Level Meso: Kebijakan dan Layanan Sosial**

### 4) Layanan Sosial Tidak Terpadu

Pendekatan sektoral menyebabkan layanan sosial, seperti ATENSI untuk lanjut usia dan KUBE untuk ekonomi lokal, belum berjalan optimal. Modal sosial lokal yang penting dalam respons krisis juga belum diarusutamakan secara me-

madai dalam kebijakan (Nuryana, 2002d; 2022c–e).

5) Kebijakan yang Tidak Terintegrasi

Ketimpangan kapasitas dan koordinasi antarsektor menyebabkan program sosial berjalan timpang, terutama bagi kelompok marjinal, anak jalanan, dan pekerja seks (Nuryana, 2004l; Soelaiman et al., 1999). Pendekatan birokratis juga kerap mengabaikan nilai lokal dan peran komunitas sebagai subjek kesejahteraan.

**Level Mikro: Individu, Keluarga, dan Komunitas**

6) Kerentanan Keluarga, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia

Rumah tangga miskin terdampak PHK, beban ganda perempuan, dan anak putus sekolah, sehingga menjadi rentan secara ekonomi dan sosial (Nuryana, 2000). Lanjut usia kehilangan jejaring dukungan akibat menguatnya keluarga nuklir, sementara layanan *home care* masih terbatas (Nuryana, 2017b; 2020b). Disorientasi remaja dan rendahnya literasi kebencanaan menegaskan lemahnya perlindungan berbasis komunitas (Nuryana et al., 2023a).

7) Keterbatasan Akses Pendidikan dan Kesehatan

Wilayah pascakonflik pada umumnya memperlihatkan capaian pemulihan yang beragam: banyak sekolah dan fasilitas kesehatan kembali beroperasi, tetapi kualitas dan pemerataan akses belum seragam karena perbedaan kapasitas tenaga, sarana, dan jangkauan geografis. Di ranah sosial, interaksi lintas kelompok berlangsung fungsional dalam keseharian, tetapi perangkat komunikasi antarbudaya dan literasi multikultural belum selalu terintegrasi secara sistematis dalam layanan publik dan pendidikan.

Oleh sebab itu, fokus kebijakan yang realistis adalah kon-

solidasi mutu layanan—melalui penguatan kurikulum sensitif konteks, standar prosedur pelayanan yang inklusif, dan mekanisme umpan balik warga—tanpa berangkat dari asumsi kerawanan, melainkan dari kebutuhan normalisasi dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan (Nuryana, 2003j; 2003m; 2017c).

#### 8) Ketergantungan Bantuan Jangka Pendek

Bantuan sosial material, seperti Program Sembako dan PKH, kurang efektif tanpa dukungan edukasi dan dimensi psikososial (Nuryana [Ed.], 1999c; Jayaputra et al., 2021c; Arifin et al., 2021d). Sistem data yang tidak presisi dan kelembagaan yang belum sinergis turut menjadi hambatan utama.

Pemetaan isu-isu tersebut menunjukkan bahwa kerentanan sosial di Indonesia bersifat sistemik, lintas generasi, dan menuntut pendekatan lintas level yang integratif, dari makro hingga mikro.

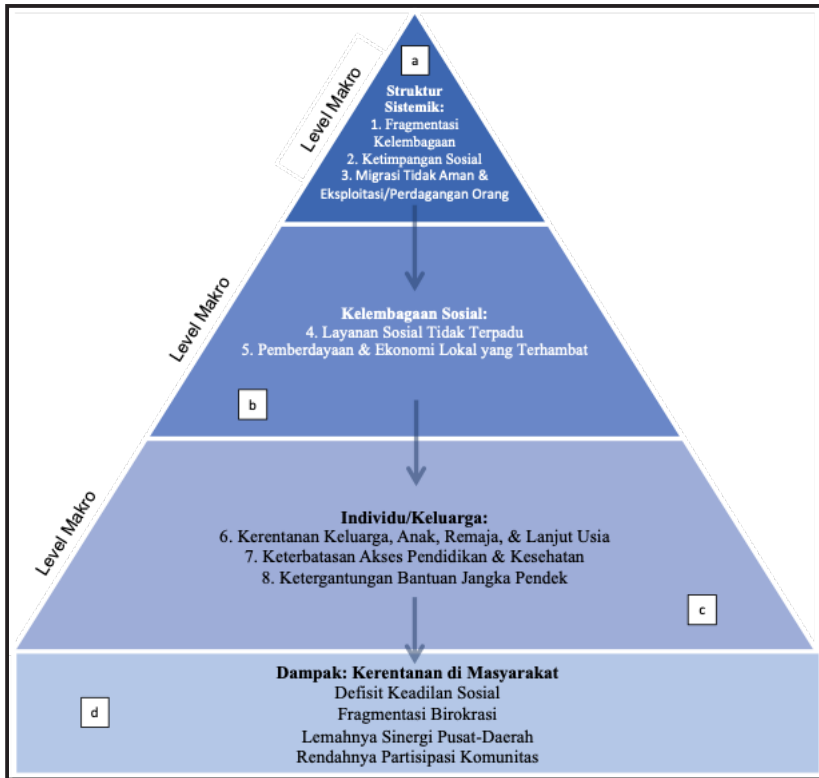
### **Dari Analisis Struktural Menuju Desain Ekosistem Terpadu: Fondasi Konseptual Model Orkestrasi Ekosistem**

Bab III menegaskan bahwa ekosistem kesejahteraan sosial Indonesia dibentuk oleh dinamika lintas level—makro (struktur dan kebijakan), meso (kelembagaan dan layanan), dan mikro (keluarga-individu). Pemetaan kerentanan memperlihatkan bahwa problem utama bukan semata kelemahan pada tingkat rumah tangga, melainkan ketakterpaduan struktural: fragmentasi kelembagaan, ketimpangan akses, dan koordinasi lintas aktor yang rapuh. Konsekuensinya adalah siklus *vulnerability trap*—bantuan jangka pendek tidak bertransformasi menjadi kapasitas jangka panjang, sementara modal sosial lokal kurang

dimobilisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan reposisi peran negara dari penyedia langsung menjadi pemungkin (*enabler*) sekaligus orkestrator yang memampukan kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah.

Temuan ini menjadi landasan konseptual bagi Model Terpadu Orkestrasi Ekosistem sebagai kerangka orkestrasi sosial yang menautkan *ecosystem orchestration*, *knowledge co-creation*, dan *adaptive governance*, sejalan dengan literatur *co-production* dalam *New Public Governance* (Osborne, Radnor, & Strokosch, 2016).

Gambar 1 mengilustrasikan keterkaitan antara struktur sistemik, kelembagaan sosial, dan kondisi individu/keluarga dalam membentuk kerentanan sosial di masyarakat. Piramida ini menegaskan bahwa akar kerentanan sosial bersumber dari fragmentasi kelembagaan dan ketimpangan sistemik yang menuntut pendekatan ko-kreasi dan tata kelola adaptif sebagaimana ditekankan dalam kerangka *New Public Governance* (Osborne et al., 2016).



Ket.: (a) Jenis-jenis kerentanan pada level makro, (b) jenis-jenis kerentanan pada level meso, (c) jenis-jenis kerentanan pada level mikro, (d) dampak kerentanan di masyarakat.

**Gambar 1.** Piramida Dinamika Struktural dan Peta Kerentanan dalam Ekosistem Kesejahteraan Sosial Indonesia

## **B. Orkestrasi Ekosistem Terpadu dalam Transformasi Kesejahteraan Sosial yang Inklusif dan Berbasis Komunitas**

Ketika sistem kesejahteraan sosial di Indonesia masih diwarnai fragmentasi kebijakan, ketimpangan struktural, dan kerentanan lintas generasi, dibutuhkan bukan sekadar pendekatan korektif, melainkan terobosan yang bersifat transformasional. MOE hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut: suatu kerangka strategis yang mengorkestrasi sinergi antara negara, komunitas, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil dalam satu ekosistem kolaboratif yang berpihak pada keadilan sosial.

### 1) Dari Fragmentasi Menuju Sintesis: Konseptualisasi Model

MOE tidak dimaksudkan sebagai slogan simbolik, melainkan hasil sintesis konseptual dari tiga pendekatan kontemporer yang saling melengkapi, yakni *ecosystem orchestration*, *adaptive governance*, dan transformasi sosial berbasis komunitas (Burstrom et al., 2023; Shirish et al., 2024; Nuryana, 2022a). Meski demikian, dialog dengan kritik (*counter-arguments*) tetap penting agar orkestrasi tidak jatuh menjadi teknokratis. Orkestrasi ekosistem berisiko memicu manajerialisme apabila tujuan diukur semata melalui kepatuhan indikator administratif; berisiko depolitisasi apabila relasi kuasa dan konflik kepentingan disamarkan sebagai “koordinasi”; dan berisiko kooptasi komunitas apabila partisipasi dibatasi pada konsultasi formal tanpa kendali warga atas keputusan. Transformasi digital juga dapat memperlebar eksklusif bagi kelompok yang tidak memiliki akses, literasi, atau perlindungan data. Karena itu, MOE mensyaratkan pagar etis: transparansi, akuntabilitas kolaborasi, perlindungan data, dan mekanisme partisipasi bermakna yang menempatkan komunitas sebagai pemilik pengetahuan dan mitra seajar. Model ini lahir dari refleksi panjang selama lebih

dari tiga dekade, baik sebagai peneliti maupun pelaku kebijakan sosial.

Secara ontologis, model ini berakar pada prinsip *justice* dan *capability* (Sen, 2009; Alkire, 2015; Stewart, 2013), yang menekankan penguatan kapasitas warga untuk mencapai kehidupan yang mereka nilai bermakna. Sementara itu, secara aksiologis, model ini mengedepankan kolaborasi lintas nilai dan lintas sektor melalui rekayasa ruang intermediasi yang memungkinkan perjumpaan dan dialog antar-pemangku kepentingan dengan latar belakang yang berbeda (Ozor et al., 2024).

## 2) Empat Pilar Strategis: Fondasi Ekosistem Kolaboratif

MOE bertumpu pada empat pilar strategis yang saling menguatkan. Keempatnya dirancang untuk menata ulang relasi warga, negara, pasar, dan teknologi agar menghasilkan ekosistem kesejahteraan yang adaptif, adil, dan berkelanjutan. Pilar-pilar ini tidak berdiri sendiri; masing-masing menjadi prasyarat bagi yang lain sehingga melahirkan daya lentur kelembagaan sekaligus arah perubahan yang jelas dan terukur.

Pilar pertama adalah inklusivitas berbasis komunitas: menempatkan komunitas sebagai produsen utama kesejahteraan, bukan sekadar penerima layanan (Nuryana, 2003d). Orientasi ini menggeser logika *top-down* menuju *co-production* layanan sosial—di mana pengetahuan lokal, aset sosial, dan praktik gotong royong menjadi sumber daya inti. Dengan begitu, intervensi tidak berhenti pada distribusi manfaat, melainkan mengakui kedaulatan komunitas dalam merancang, menguji, dan mengukur solusi yang relevan dengan konteksnya.

Pilar kedua adalah kolaborasi lintas sektor dalam format “simfoni sosial”, yang menegaskan peran negara sebagai

pemungkin (*enabler*), bukan pengendali tunggal (Zeng, 2022). Negara menata standar, menyediakan insentif, dan menjaga tata kelola; sementara komunitas, pelaku usaha, akademisi, dan filantropi menjalankan peran komplementer sesuai kompetensinya. Dengan aransemen yang tepat, orkestrasi ini meminimalkan tumpang tindih, menutup kesenjangan layanan, dan mempercepat difusi inovasi sosial.

Pilar ketiga adalah penguatan nilai lokal sebagai basis ketahanan sosial sekaligus jembatan dialog antarbudaya. Nilai, bahasa, dan praktik lokal tidak hanya berfungsi sebagai perekat sosial, tetapi juga sebagai kompas etis yang mengarahkan prioritas kebijakan dan desain program. Ketika nilai lokal diarusutamakan, proses belajar lintas budaya menjadi lebih setara; praktik baik dapat diadaptasi tanpa mengorbankan identitas komunitas; dan ketahanan sosial meningkat karena solusi bertolak dari makna yang diakui bersama.

Pilar keempat adalah transformasi digital sosial yang adil dan partisipatif, yang memastikan teknologi memperluas akses, meningkatkan kapabilitas warga, dan tidak mereproduksi bias atau kesenjangan (Shirish et al., 2024; OECD, 2023). Prinsip keadilan digital diterapkan melalui desain yang inklusif, literasi data, tata kelola yang akuntabel, dan mekanisme umpan balik yang terbuka. Dengan demikian, digitalisasi menjadi pengungkit kolaborasi—bukan sekadar otomasi—yang memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data sekaligus menjaga perlindungan hak-hak warga.

Dirangkai secara utuh, keempat pilar tersebut membentuk struktur ekosistem yang mampu menjawab kompleksitas sosial melalui sinergi nilai lokal, kolaborasi lintas aktor, dan inovasi digital demi kemaslahatan bersama. Dalam operasionalnya, orkestrasi tidak dipahami sebagai peran tunggal, melainkan

sebagai fungsi yang dapat dijalankan secara kolektif melalui simpul-simpul pada level meso—misalnya unit orkestrasi sosial, SLRT/Puskesmas, jejaring perguruan tinggi/BRIN, dan mitra dunia usaha—yang menghubungkan agenda pada level makro (kebijakan dan sistem data) dengan praktik pada level mikro (pendampingan keluarga, pengorganisasian komunitas, dan layanan berbasis kebutuhan). Dengan pembagian level tersebut, alur model menjadi lebih jelas: dimulai dari pemetaan kerentanan berbasis bukti dan pengalaman hidup, dilanjutkan kreasi solusi bersama komunitas, diikuti orkestrasi implementasi lintas sektor, dan diperkuat oleh umpan balik serta pembelajaran adaptif yang mendorong perbaikan kebijakan secara berulang. Inilah yang membedakan model ini sebagai sebuah “arsitektur sistem”, bukan sekadar kumpulan program.

### 3) Dari Konsep ke Praktik: Operasionalisasi Model

Model ini tidak berhenti pada tataran teoretis, melainkan dioperasionalkan melalui prinsip *knowledge co-evolution* dan pembentukan *middleground*—ruang kolaboratif antara aktor mikro (komunitas, individu) dan aktor makro (pemerintah, institusi). Delapan isu strategis sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III menjadi medan penerapan model ini.

Pada level mikro, isu anak dan remaja menegaskan peran keluarga dan komunitas sebagai pelindung pertama dan utama. Interaksi sehari-hari dan dukungan sosial yang konsisten berpengaruh signifikan terhadap pembentukan perilaku, penguatan resiliensi, dan kesejahteraan psikososial anak. Intervensi yang memperkuat kapasitas keluarga, komunitas, dan lembaga sosial seperti panti asuhan terbukti efektif dalam mencegah dan merespons risiko yang dihadapi anak dan remaja

(Nuryana, 2001a; Soelaiman & Nuryana, 1999; Nuryana, 2004a; Rumble, Ramly, Nuryana, & Dunne, 2018).

Pada isu lanjut usia, perhatian pada level mikro difokuskan melalui pendekatan *home care* berbasis komunitas, dengan memandang lanjut usia bukan sebagai beban, melainkan sebagai *social capital* yang bernilai. Dukungan keluarga dan keterlibatan komunitas lokal menjadi faktor utama dalam menjaga kualitas hidup, kemandirian, dan integrasi sosial lanjut usia (Nuryana, 2020f; Nuryana, 2020b; Nuryana et al., 2022c; Nuryana, 2021b).

Dalam konteks migrasi dan perdagangan orang, model ini terutama beroperasi pada level meso, yaitu pada tataran sistem sosial komunitas yang menjembatani kebijakan makro dengan dinamika kehidupan individu di level mikro. Pendekatan ini menekankan mekanisme perlindungan dan pemberdayaan berbasis komunitas, dengan dukungan sistem informasi dan pendampingan digital untuk memperkuat kapasitas lokal dalam deteksi dini, advokasi, dan dukungan sosial bagi korban maupun kelompok rentan (Nuryana & Nainggolan, 2004g; Nuryana & Beke, 2004i; Nuryana, 2003i). Dengan demikian, intervensi tidak berhenti pada kebijakan nasional atau kerja teknokratik di tingkat makro, melainkan menembus struktur sosial komunitas sebagai arena nyata pencegahan dan pemulihan (Nuryana, 2002b; 2003e; 2019a).

Keberhasilan replikasi model KUBE selama masa krisis juga menjadi bukti ketangguhan pendekatan komunitatif pada level meso, yakni pemberdayaan masyarakat melalui kelembagaan sosial lokal sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan dinamika kehidupan warga (Sumarno et al., 2020; Nuryana, 2002b; Nuryana, 2003i; Nuryana, 2020c). Pada level ini, KUBE berfungsi bukan hanya sebagai wahana ekonomi produktif, tetapi juga sebagai pranata sosial yang menumbuhkan solidaritas,

memperkuat kapasitas kolektif, dan membangun mekanisme adaptif masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial dan krisis (Nuryana, 2003e; 2005d; 2019a; Sumarno et al., 2020).

#### 4) Diferensiasi: Melampaui Pendekatan Konvensional

MOE menandai pergeseran dari pendekatan sektoral dan birokratis menuju paradigma *shared governance* yang lebih fleksibel, adaptif, dan berlandaskan interdependensi (Ferenhof & de Sousa, 2022). Model ini secara sistematis menjembatani kebijakan makro dengan praktik mikro melalui struktur tata kelola yang partisipatif dan kontekstual, dengan negara, lembaga sosial, dan komunitas berperan secara sinergis dalam membangun mekanisme kesejahteraan yang berkelanjutan (Nuryana, 2002b; 2003i; 2005d; 2019a). Pendekatan tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas level dan lintas sektor sebagai inti tata kelola sosial yang inklusif dan responsif terhadap perubahan.

Keunggulan utama model ini terletak pada kemampuannya membaca dinamika lokal dan mengintegrasikannya ke dalam kerangka nasional, sehingga terbangun sinergi dua arah antara pusat dan akar rumput (Burström et al., 2023; Nuryana, 2002, 2017). Sinergi ini juga ditopang secara kelembagaan melalui integrasi berbagai registrasi sosial nasional—seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)—yang membentuk suatu integrasi sosial tercatat, yakni keterpaduan data kesejahteraan masyarakat yang terdokumentasi secara sistematis dan menjadi landasan bagi arsitektur perlindungan sosial adaptif dalam merespons guncangan secara cepat (Kementerian Sosial RI, 2021; Kementerian Koordinator PMK, 2024; BPS, 2024; UNICEF Indonesia, 2024; World Bank, 2024).

## 5) Kebaruan Ilmiah dan Kontribusi Keilmuan

Sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu kesejahteraan sosial, MOE menawarkan sejumlah kebaruan yang signifikan:

1. mensintesis pendekatan orkestrasi, tata kelola adaptif, dan evolusi pengetahuan menjadi satu kerangka transformasi sosial yang kohesif (Ferenhof & de Sousa, 2022; Ozor et al., 2024);
2. mengusulkan konsep *intermediary orchestration* sebagai ruang rekonsiliasi lintas aktor, yang sebelumnya cenderung bekerja dalam silo sektoral;
3. menempatkan komunitas sebagai subjek aktif dan produsen utama kesejahteraan sosial—bukan sekadar objek kebijakan—yang diperkuat oleh puluhan hasil penelitian (Nuryana, 2003e; 2004m; 2022f); dan
4. mengembangkan model *triple helix* yang selama ini bersifat statis menjadi bentuk orkestratif yang dinamis, adaptif, dan berakar pada realitas lokal.

Konsep *intermediary orchestration* perlu ditegaskan sebagai mekanisme level meso yang berbeda dari sekadar “broker” jaringan. Jika *brokerage* menekankan perantaraan koneksi, *intermediary orchestration* menekankan desain ruang pertemuan yang stabil: menyelaraskan tujuan, mengelola konflik kepentingan, membangun aturan kolaborasi, dan memastikan pengetahuan komunitas benar-benar masuk ke siklus kebijakan. Konsep ini juga berbeda dari *boundary organization* yang berfokus pada batas sains–kebijakan, karena *intermediary orchestration* mencakup batas negara–pasar–komunitas dan batas lintas level layanan. Dengan perbedaan ini, “intermediary” dalam model bukan sekadar label aktor,

melainkan fungsi orkestratif yang dapat diinstitusionalisasi agar kolaborasi tidak bergantung pada figur tertentu.

Dengan demikian, kebaruan utama MOE terletak pada kemampuannya menyatukan berbagai pendekatan yang sebelumnya berdiri sendiri menjadi satu kerangka orkestrasi yang dinamis, adaptif, dan berbasis komunitas. Model ini tidak hanya memperbarui kerangka *triple helix* yang selama ini cenderung statis, tetapi juga menghadirkan *intermediary orchestration* sebagai ruang perjumpaan lintas aktor yang memungkinkan rekonsiliasi kepentingan dan kolaborasi sejajar. Perbedaan mendasarnya dibanding pendekatan konvensional adalah pergeseran posisi komunitas: dari objek kebijakan menjadi produsen utama kesejahteraan sosial.

Agar kontribusi ilmiah lebih demonstratif, Model Orkestrasi Ekosistem dapat dirumuskan sebagai proposisi yang dapat diuji dan diperdebatkan:

- Proposisi 1: semakin kuat *intermediary orchestration* di level meso, semakin rendah fragmentasi layanan dan semakin tinggi koherensi kebijakan lintas sektor.
- Proposisi 2: semakin bermakna *knowledge co-evolution* (ko-kreasi pengetahuan dengan komunitas), semakin tepat sasaran dan kontekstual desain intervensi sosial sepanjang siklus hidup.
- Proposisi 3: semakin adaptif tata kelola (*adaptive governance*) melalui umpan balik dan pembelajaran, semakin cepat sistem merespons guncangan sosial tanpa mengorbankan inklusivitas.
- Proposisi 4: transformasi digital yang dikawal prinsip keadilan (akses, literasi, dan perlindungan data) meningkatkan efektivitas orkestrasi; sebaliknya, digitalisasi tanpa

pagar etis berpotensi memperlebar eksklusivitas.

#### 6) Implikasi Strategis: Dari Indonesia untuk Dunia

MOE menawarkan peta jalan reformasi sistem kesejahteraan sosial Indonesia yang (1) inklusif karena berakar pada kekuatan komunitas dan nilai-nilai lokal (Nuryana, 2002b; 2003i; 2003e); (2) berkelanjutan melalui pendekatan *co-creation* lintas generasi dan lintas sektor (Nuryana, 2016a; 2019a); dan (3) transformatif karena menjembatani struktur makro dengan dinamika mikro dalam satu kesatuan ekosistem sosial yang partisipatif dan adaptif (Nuryana, 2005d; 2008; 2020c; 2021b).

Pada level global, MOE berpotensi menjadi kontribusi khas Indonesia dalam diskursus internasional tentang rekayasa sosial berbasis kolaborasi, sebagaimana dibahas dalam kerangka *co-production* dalam *New Public Governance* (Osborne, Radnor, & Strokosch, 2016). Pada level nasional, model ini menyediakan arah menuju kebijakan sosial yang berbasis bukti, berlandaskan nilai, dan berorientasi pada penguatan warga (Nuryana, 2022f; Sorrentino, Sicilia, & Howlett, 2018; Setiaasih et al., 2025).

#### 7) Model Orkestrasi Ekosistem sebagai Ikhtiar Membangun Kembali Ekosistem Sosial

MOE bukan sekadar inovasi kebijakan, melainkan hasil perjalanan panjang penelitian yang berakar pada realitas sosial Indonesia. Model ini merupakan ikhtiar untuk membangun kembali ekosistem kesejahteraan sosial yang lebih adil, resilien, dan berakar pada nilai-nilai kemanusiaan. Model ini mengajak kita memaknai kesejahteraan bukan dari menara kebijakan yang elitis, melainkan dari simpul-simpul komunitas tempat kehidupan rakyat bertumbuh, saling menopang, dan berdaya.

Kelebihan utama model ini terletak pada landasan empiris yang kuat dan kesinambungan riset lebih dari tiga dekade.

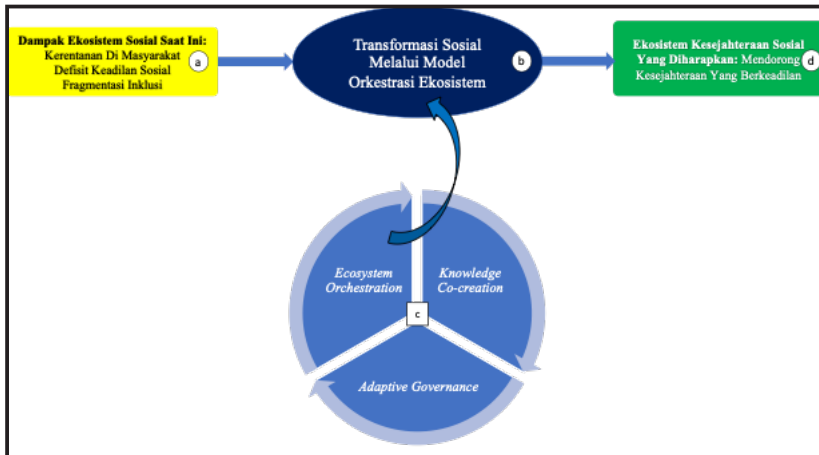
Rangkaian studi yang konsisten menelusuri fase eksplorasi konseptual, pengembangan model, hingga penerapan kebijakan sosial pada berbagai tingkat, sehingga membentuk basis pengetahuan yang kumulatif (Nuryana, 2003d; 2004m; 2020f; 2022a; 2022f). Penekanan rujukan pada rangkaian karya tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa model ini tidak berdiri sebagai konstruksi teoretis semata, melainkan lahir dari sintesis temuan lapangan dan refleksi jangka panjang atas dinamika sosial di Indonesia.

Temuan penting yang dihasilkan adalah konsep *intermediary orchestration*, yaitu bentuk kolaborasi lintas aktor di tingkat meso yang menjembatani kebijakan makro dengan praktik mikro komunitas. Konsep ini menyempurnakan pendekatan *triple helix*—yang semula menekankan sinergi negara, dunia usaha, dan masyarakat—menjadi MOE yang lebih inklusif, adaptif, dan berbasis realitas komunitas Indonesia. Model ini menjadi keunggulan konseptual karena berhasil mengintegrasikan tata kelola kebijakan sosial dengan struktur sosial yang hidup di masyarakat.

Kelebihan lainnya adalah sifat model yang kontekstual dan replikatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ini dapat diterapkan di berbagai konteks sosial tanpa kehilangan prinsip dasarnya: partisipasi, kolaborasi, dan keberlanjutan (Nuryana, 2019a; 2020c; 2021b). Dalam berbagai studi lapangan, MOE terbukti mampu memperkuat daya lenting sosial komunitas dan meningkatkan efektivitas kebijakan yang sebelumnya terfragmentasi.

Diagram pada Gambar 2 memvisualisasikan MOE sebagai jembatan konseptual antara defisit keadilan sosial dan ekosistem kesejahteraan berkeadilan, melalui tiga mekanisme yang saling terkait—*ecosystem orchestration*, *knowledge co-creation*, dan

*adaptive governance*. Model ini sejalan dengan kerangka *New Public Governance* dan literatur *co-production of public value* (Osborne, Radnor, & Strokosch, 2016), yang menekankan bahwa nilai publik lahir dari kolaborasi antara negara, komunitas, dan warga sebagai produsen kesejahteraan sosial.



Ket.: (a) Dampak ekosistem sosial saat ini: kerentanan di masyarakat, defisit keadilan sosial, fragmentasi inklusi; (b) transformasi sosial melalui Model Orkestrasi Ekosistem; (c) ekosistem kesejahteraan sosial yang diharapkan; (d) *core enablers* Model Orkestrasi Ekosistem.

Sumber: Nuryana (2025)

**Gambar 2:** Transformasi Ekosistem Kesejahteraan Sosial Indonesia: Dari Peta Kerentanan Menuju Model Terpadu Orkestrasi Ekosistem

## IV. FORMULASI MODEL ORKESTRASI EKOSISTEM UNTUK TATA KELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA

Bab ini memaparkan kontribusi ilmiah utama yang dihasilkan dari penelitian, khususnya melalui perumusan MOE sebagai sintesis konseptual dan inovasi kebijakan sosial berbasis komunitas. Bab ini menjadi jembatan antara analisis empiris pada bab sebelumnya dan formulasi teoretis yang menegaskan posisi penelitian ini dalam khazanah ilmu kesejahteraan sosial.

Melalui bab ini diuraikan dasar-dasar keilmuan, struktur konseptual, serta implikasi teoretis dan praktis dari model yang dikembangkan. Dengan menempatkan MOE sebagai hasil integrasi dari berbagai pendekatan mutakhir—seperti *ecosystem orchestration*, *adaptive governance*, dan *knowledge co-evolution*—bab ini menunjukkan bagaimana model tersebut memperkaya wacana kebijakan sosial yang lebih inklusif, adaptif, dan kolaboratif dalam konteks Indonesia.

### A. Model Orkestrasi Ekosistem sebagai Kontribusi Ilmiah

*Ecosystem orchestration* memungkinkan koordinasi lintas aktor dan institusi (Burström et al., 2023; Zeng, 2022; De et al., 2024), *adaptive governance* memberikan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan yang responsif terhadap perubahan sosial (Schultz et al., 2015; Mann et al., 2021), dan *knowledge co-evolution* menegaskan peran komunitas sebagai produsen utama pengetahuan dan kesejahteraan sosial, bukan sekadar

penerima manfaat (Ferenhof & de Sousa, 2022; Nuryana, 2005d; Sen, 2009; Stewart, 2013).

Kebaruan model ini terletak pada pergeseran paradigma dari pendekatan *top-down* menuju kebijakan yang berbasis nilai, lokalitas, dan daya kolektif. Integrasi teori-teori tersebut tidak hanya menyatukan literatur yang ada, tetapi juga menghasilkan solusi inovatif dan aplikatif, sekaligus menjadi alternatif yang relevan terhadap kerangka kebijakan sosial konvensional.

## **B. Aspek Teoretis dan Ilmiah**

Sebagai sintesis teoretis yang memadukan teori orkestrasi ekosistem (Burström et al., 2023; Zeng, 2022; De et al., 2024), tata kelola adaptif dalam sistem sosial-ekologis (Schultz, Folke, Österblom, & Olsson, 2015; Mann, Loft, & Hernández-Morcillo, 2021), serta ko-evolusi pengetahuan berbasis komunitas/*Participatory Action Research* (PAR) (Ferenhof & de Sousa, 2022; Nuryana, 2005d; Nuryana, 2003i; Nuryana, 2002b) yang ditopang oleh *capability approach* dan peran institusi sosial (Sen, 2009; Stewart, 2013), MOE menghadirkan inovasi konseptual yang memperluas wawasan ilmu kebijakan sosial.

Integrasi antara *ecosystem orchestration*, *adaptive governance*, dan *knowledge co-evolution* menciptakan kerangka analisis komprehensif untuk memahami interaksi kompleks antara komunitas, negara, dan aktor lintas lembaga. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang berbasis nilai dan lokalitas, sehingga menempatkan kearifan sosial dan budaya setempat sebagai pijakan utama dalam merancang kebijakan.

Model ini juga menegaskan kebaruan ilmiah yang tidak hanya memanfaatkan teori terdahulu (Burström et al., 2023; Schultz et al., 2015; Ferenhof & de Sousa, 2022), tetapi juga

mengembangkannya menjadi solusi yang relevan dengan tantangan sosial di Indonesia. Dengan demikian, MOE bukan sekadar penyempurna teori, melainkan menawarkan paradigma baru yang aplikatif, inovatif, dan berdampak luas, sekaligus memperkaya khazanah ilmiah global dalam konteks kolaborasi berbasis komunitas.

### C. Dampak Ilmiah dan Penemuan Konseptual

MOE memberikan kontribusi ilmiah utama melalui pengembangan konseptual dalam teori tata kelola, kesejahteraan sosial, dan kebijakan publik. Dalam perspektif tata kelola, model ini memperluas pemahaman *governance* dari koordinasi antar-organisasi menuju orkestrasi lintas level yang secara eksplisit menempatkan fungsi perantara sebagai mekanisme kunci. Kebaruan konseptualnya terletak pada perumusan *intermediary orchestration* sebagai fungsi orkestratif yang secara sadar dirancang untuk menjembatani kebijakan level makro dengan praktik kesejahteraan sosial di tingkat komunitas, melampaui pendekatan *brokerage* atau *boundary organization* yang bersifat parsial dan episodik.

Dalam teori kesejahteraan sosial, model ini menggeser paradigma dari pendekatan programatik dan sektoral menuju pemahaman kesejahteraan sebagai proses sosial yang dihasilkan melalui orkestrasi relasi antar-aktor, pengetahuan, dan kapabilitas. Komunitas diposisikan sebagai produsen kesejahteraan sosial, sementara negara berperan sebagai *enabler* yang menjaga arah, keberlanjutan, dan keadilan tata kelola. Dengan demikian, efektivitas intervensi tidak ditentukan terutama oleh cakupan program atau besaran bantuan, melainkan oleh kualitas

orkestrasi dan pembelajaran kebijakan yang berlangsung secara berkelanjutan.

Dalam perspektif kebijakan publik, MOE merepresentasikan pergeseran dari kebijakan sebagai instrumen statis menuju kebijakan sebagai proses adaptif yang diorkestrasi. Efektivitas kebijakan kesejahteraan sosial bergantung pada kapasitas sistem untuk menyerap umpan balik, mengelola ketegangan antar-kepentingan, serta menyesuaikan desain dan implementasi kebijakan secara kontekstual. Secara teoretis, model ini dirumuskan melalui tiga proposisi utama: orkestrasi lintas level meningkatkan koherensi kebijakan dalam sistem yang terfragmentasi; *intermediary orchestration* memperkuat integrasi pengetahuan komunitas ke dalam siklus kebijakan; dan pembelajaran kebijakan berbasis ekosistem menopang keberlanjutan intervensi kesejahteraan sosial. Proposisi ini bekerja dalam prasyarat tertentu—kapasitas kelembagaan minimal, ruang partisipasi komunitas yang nyata, dan komitmen negara terhadap keadilan sosial—dan membuka implikasi metodologis bagi penelitian lintas level, partisipatif, dan berorientasi pada proses.

## V. DINAMIKA STRATEGIS DAN TRANSFORMATIF MODEL ORKESTRASI EKOSISTEM

MOE yang dikemukakan dalam orasi ini merupakan hasil sintesis evolusi konseptual dan empiris dari rangkaian riset penulis selama lebih dari tiga dekade, dan menggantikan terminologi sebelumnya yang masih bersifat operasional.

Bab ini menguraikan kontribusi MOE terhadap kebijakan dan tata kelola kesejahteraan sosial dengan menautkan temuan konseptual pada implikasi kebijakan dan praktik kelembagaan. Pembahasan difokuskan pada: (1) relevansi bagi pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat ekosistem kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan; (2) implikasi tata kelola, khususnya pergeseran menuju *shared governance* melalui orkestrasi lintas aktor; (3) rekomendasi strategis yang mencakup desain kelembagaan, integrasi kebijakan, dan digitalisasi sosial yang etis dan partisipatif; serta (4) dampak praktis jangka panjang yang berpotensi mendorong transformasi struktural dan sosial.

### A. Relevansi Strategis bagi Pemerintah dan Masyarakat

MOE hadir sebagai jawaban atas krisis sistemik dalam tata kelola kesejahteraan sosial yang selama ini masih bersifat sektoral dan birokratis. Model ini tidak hanya menawarkan inovasi teknis, tetapi juga memberikan dasar ilmiah bagi transformasi kebijakan menuju tata kelola berbasis *shared governance* yang mengakui

kapasitas komunitas sebagai aktor penting dalam ekosistem kesejahteraan sosial.

Dengan demikian, kontribusi ini berimplikasi langsung pada upaya pemerintah dalam membangun sistem kesejahteraan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Sebagai *policy pathway*, implementasi MOE dapat dibaca dalam tiga lintasan tindakan: (a) lintasan cepat (*quick wins*) untuk menutup celah layanan kritis melalui integrasi rujukan, pendampingan keluarga, dan perbaikan akurasi penargetan; (b) lintasan penguatan level meso untuk membangun simpul orkestrasi (unit orkestrasi sosial, SLRT/Puskesmas, jejaring riset, dan mitra usaha) yang menjaga kolaborasi tetap berjalan; dan (c) lintasan reformasi sistem untuk menata ulang aturan main, pendanaan, dan tata kelola data agar pembelajaran kebijakan menjadi kebiasaan institusional. Dengan pembacaan ini, rekomendasi tidak hadir sebagai daftar program, melainkan sebagai urutan perubahan yang realistis—dari layanan hingga sistem.

## **B. Implikasi untuk Tata Kelola Pemerintahan**

Penerapan model ini mengandaikan terjadinya transisi kelembagaan dari pendekatan sektoral menuju mekanisme orkestratif yang menempatkan aktor *middleground* sebagai penghubung antara negara, pasar, dan komunitas. Hal ini juga menuntut redefinisi peran negara—dari semula sebagai pelaksana langsung menjadi *enabler* sekaligus integrator dalam tata kelola sosial (Zeng, 2022). Pergeseran paradigma dari tata kelola yang bersifat *top-down* menuju *shared governance* menegaskan pentingnya penghargaan terhadap praktik lokal dan pengetahuan komunitas (Mann et al., 2021).

Implikasi lain yang menguat ialah kebutuhan akan inklusivitas kelembagaan melalui digitalisasi yang etis, partisipasi warga, dan

optimalisasi modal sosial dalam kerangka kolaborasi multiaktor (OECD, 2023; Shirish et al., 2024).

### C. Rekomendasi Strategis Prioritas Pemerintah

Berdasarkan temuan dan implikasi tersebut, terdapat sejumlah rekomendasi prioritas yang relevan untuk diadopsi pemerintah. Pertama, penyusunan RI-EKSOSNAS, yakni dokumen strategis lintas sektor yang memayungi delapan isu kesejahteraan sosial sekaligus menjembatani arah kebijakan RPJMN dan RPJPN. Kedua, pembentukan Unit Orkestrasi Sosial sebagai penghubung antarlembaga sekaligus inkubator kolaborasi berbasis *knowledge co-evolution* (Ferenhof & de Sousa, 2022). Ketiga, redesain program perlindungan sosial seperti PKH, KUBE, dan ATENSI agar lebih kontekstual, inklusif, dan berorientasi pada siklus hidup serta pengetahuan lokal (Nuryana, 2014; 2023a; 2023b). Keempat, pembangunan Infrastruktur Digital Sosial untuk memperluas akses layanan, memperkuat basis data komunitas, dan mendukung platform yang lebih inklusif (OECD, 2023; UN ESCAP, 2020).

Untuk memperjelas tahapan, peta jalan reformasi dapat disusun secara bertahap. Tahap 1 (0–12 bulan): konsolidasi agenda lintas sektor melalui RI-EKSOSNAS, pemetaan simpul orkestrasi di daerah, serta perbaikan minimum integrasi data dan rujukan layanan pada isu prioritas. Tahap 2 (1–3 tahun): penguatan kelembagaan level meso (Unit Orkestrasi Sosial/SLRT/Puskesmas) sebagai ruang ko-kreasi dan integrator program, disertai redesain perlindungan sosial agar lebih kontekstual dan berbasis siklus hidup. Tahap 3 (3–5 tahun): pelembagaan tata kelola adaptif—melalui aturan kolaborasi, skema pendanaan, dan mekanisme evaluasi berbasis umpan balik—sehingga orkestrasi tidak bergantung pada proyek atau

figur, melainkan menjadi cara kerja sistem. Kelima, penguatan kapasitas komunitas melalui pengakuan formal, insentif fiskal, dan regulasi yang mendukung kemitraan strategis antara negara, pasar, dan masyarakat sipil.

#### **D. Dampak Praktis Jangka Panjang**

Implementasi konsisten rekomendasi ini dalam jangka panjang berpotensi membentuk tata kelola kesejahteraan sosial yang lebih sinergis, responsif, dan inklusif. Agar dampak tidak berhenti pada tataran normatif, diperlukan indikator implementasi dan pembelajaran kebijakan yang sederhana namun bermakna. Indikator proses meliputi tingkat integrasi rujukan lintas layanan, kualitas forum ko-kreasi—terutama keterwakilan dan pengaruh komunitas dalam pengambilan keputusan—serta frekuensi perbaikan kebijakan berbasis umpan balik. Indikator hasil mencakup penurunan eksklusi kelompok rentan, peningkatan ketepatan sasaran, percepatan respons terhadap guncangan sosial, serta penguatan solidaritas komunitas. Dengan kerangka indikator ini, MOE berfungsi sebagai instrumen evaluatif yang memungkinkan koreksi adaptif secara berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, sistem ini tidak hanya memperkuat ketahanan sosial, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup komunitas rentan dan solidaritas antarwarga. Lebih jauh, model ini menyediakan panduan strategis bagi perancang kebijakan di tingkat nasional dan global, serta membuka peluang bagi Indonesia untuk tampil sebagai rujukan tata kelola sosial berbasis kolaborasi dan inovasi.

#### **E. Dialog dengan Riset Eksternal dan Relevansi Global**

Temuan empiris dan refleksi kebijakan dalam bab ini selaras dengan kecenderungan riset internasional yang menekankan

pentingnya tata kelola kolaboratif, pembelajaran kebijakan, dan pendekatan ekosistem dalam menghadapi kompleksitas persoalan sosial. Berbagai studi global menunjukkan bahwa fragmentasi kebijakan, lemahnya koordinasi lintas sektor, dan keterputusan antara kebijakan dan praktik komunitas merupakan tantangan umum di berbagai negara. Dalam konteks ini, MOE tidak berdiri terpisah dari diskursus global, melainkan menawarkan elaborasi konseptual dan empiris yang berakar pada pengalaman Indonesia sekaligus memperkaya perdebatan internasional tentang tata kelola kesejahteraan sosial yang adaptif, kontekstual, dan berkeadilan di tengah ketidakpastian.

#### **F. Mekanisme Implementasi Minimal dalam Kerangka Orkestrasi Ekosistem**

Agar implikasi praktis MOE dapat diwujudkan, diperlukan mekanisme implementasi minimal yang realistis dan bertahap. Tahap awal difokuskan pada penguatan simpul orkestrasi di level meso sebagai ruang integrasi kebijakan, layanan, dan pembelajaran lintas aktor. Tahap berikutnya menekankan peningkatan kapasitas aktor—negara, komunitas, dan mitra non-negara—dalam mengelola kolaborasi, memanfaatkan data sosial, serta membangun mekanisme umpan balik kebijakan. Pada tahap lanjut, orkestrasi diarahkan pada replikasi dan institusionalisasi praktik baik melalui penyesuaian regulasi, penguatan pembiayaan berkelanjutan, dan integrasi pembelajaran kebijakan ke dalam sistem kesejahteraan sosial. Dengan pendekatan ini, MOE menawarkan arah implementasi yang pragmatis tanpa mengabaikan kompleksitas sosial dan tuntutan keadilan sosial.



## VI. KESIMPULAN

Di tengah transformasi sosial yang sarat ketidakpastian, ilmu pengetahuan dituntut berfungsi sebagai penuntun perubahan yang transformatif. Dalam konteks ini, tata kelola kesejahteraan sosial tidak lagi memadai jika bertumpu pada pendekatan sektoral dan fragmentaris, melainkan harus bergerak menuju kerangka yang berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan untuk merespons kompleksitas kerentanan multidimensi.

Klaim ilmiah utama orasi ini dirumuskan sebagai tesis yang menegaskan bahwa paradigma orkestratif—yang mengintegrasikan *ecosystem orchestration*, tata kelola adaptif, dan *knowledge co-evolution*—lebih memadai dibanding pendekatan sektoral yang prosedural. Namun, efektivitas paradigma ini mensyaratkan partisipasi yang bermakna, perlindungan data dan keadilan akses digital, dan keberadaan institusi level meso yang mampu menjaga kolaborasi lintas kepentingan. Dengan prasyarat tersebut, MOE diposisikan sebagai kerangka kerja terbuka yang dapat diuji, disempurnakan, dan direplikasi melalui pembelajaran kebijakan berkelanjutan.

Sebagai sintesis konseptual sekaligus arsitektur praksis, MOE dibangun atas empat pilar strategis: inklusivitas berbasis komunitas, kolaborasi lintas sektor, penguatan nilai dan budaya lokal, serta transformasi digital yang adil dan partisipatif. Kerangka ini menegaskan bahwa krisis kesejahteraan sosial merupakan persoalan sistemik yang menuntut penataan ulang cara kerja kebijakan, bukan sekadar penambahan program.

Dalam kerangka tersebut, komunitas ditempatkan sebagai produsen utama kesejahteraan sosial. Pengetahuan lokal,

kapasitas resiliensi, dan daya hidup komunitas dipahami sebagai sumber daya strategis yang harus diorkestrasi secara kolektif oleh negara, masyarakat, dan aktor nonpemerintah dalam kebijakan nasional.

Pada akhirnya, kesimpulan ini menegaskan komitmen etis bahwa ilmu kesejahteraan sosial harus berdaya ubah. MOE bukan hanya kontribusi teoretis, melainkan ikhtiar moral untuk merawat kemanusiaan melalui kolaborasi, keberpihakan, dan rekayasa sosial berbasis nilai. Kendati demikian, keterbatasan kapasitas kelembagaan, komitmen politik, ketimpangan wilayah, dan relasi kuasa yang asimetris tetap menjadi tantangan implementasi. Oleh karena itu, model ini perlu dipahami bukan sebagai solusi final, melainkan sebagai kerangka kerja adaptif yang terus disempurnakan melalui dialog sosial, pembelajaran kebijakan, dan refleksi kritis berkelanjutan.

## VII. PENUTUP

Orasi ilmiah ini merepresentasikan akumulasi pemikiran, pengalaman empiris, dan refleksi kebijakan selama lebih dari tiga dekade dalam bidang kesejahteraan sosial. Melalui perumusan MOE, orasi ini menegaskan bahwa tantangan kesejahteraan sosial kontemporer tidak dapat dijawab melalui pendekatan sektoral dan prosedural semata, melainkan memerlukan tata kelola yang mampu mengorkestrasi aktor, pengetahuan, dan pembelajaran kebijakan secara adaptif dan berkelanjutan.

MOE yang dikemukakan dalam orasi ini tidak dimaksudkan sebagai formula final, melainkan sebagai kerangka kerja konseptual dan operasional yang terbuka untuk diuji, dikritisi, dan disempurnakan. Dalam konteks perubahan sosial yang cepat, kompleks, dan sarat ketidakpastian, keberhasilan transformasi kesejahteraan sosial sangat ditentukan oleh kemampuan sistem untuk belajar, beradaptasi, dan menjaga keseimbangan antara efektivitas kebijakan dan keadilan sosial.

Sebagai penutup, orasi ini menegaskan komitmen keilmuan untuk terus mengembangkan IPTEK kesejahteraan sosial yang berakar pada realitas sosial, menghormati pengetahuan komunitas, dan berorientasi pada keberlanjutan. Dengan semangat kolaborasi dan refleksi kritis, MOE diharapkan dapat menjadi kontribusi yang bermakna bagi penguatan tata kelola kesejahteraan sosial di Indonesia dan memperkaya diskursus keilmuan di tingkat global.



## UCAPAN TERIMA KASIH

Orasi ilmiah ini merupakan hasil dari proses keilmuan yang tumbuh dalam ekosistem riset dan kebijakan yang melibatkan beragam aktor serta ruang pembelajaran kolaboratif.

Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, atas dukungan terhadap penguatan riset nasional. Apresiasi juga disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo, atas amanah melalui Keputusan Presiden Nomor 6/M Tahun 2017 yang menjadi fondasi pengangkatan sebagai Peneliti Ahli Utama.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., atas kepemimpinan dan komitmen dalam membangun ekosistem riset yang terbuka, kolaboratif, dan lintas sektor. Penghargaan juga diberikan kepada Dr. Laksana Tri Handoko, M.Sc., Kepala BRIN periode 2021–2025, atas dedikasi dalam konsolidasi dan penguatan riset nasional, serta kepada Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., DESD., IPU., ASEAN Eng., Wakil Kepala BRIN, atas dukungan strategis dalam mendorong sinergi kelembagaan dan efektivitas program riset.

Apresiasi disampaikan kepada Ketua dan Sekretaris Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Prof. Ir. Wimpie Agoeng Noegroho Aspar, MSCE., Ph.D., dan Prof. Dr. Ir. Zainal Arifin, M.Sc., atas arahan, ketelitian, dan fasilitasi yang memungkinkan

seluruh rangkaian pengukuhan terselenggara secara baik dan bermartabat.

Terima kasih disampaikan kepada Prof. Dr. Ir. Husein Avicena Akil, M.Sc., Prof. Dr. Ir. Rachmini Saparita, M.T., Prof. Ellya Susilowati, Ph.D., dan Prof. Dr. Koeswinarno, M.Hum., atas masukan substantif yang menajamkan argumentasi, memperkaya perspektif, dan menyempurnakan naskah orasi ini sebagai satu kesatuan pemikiran ilmiah.

Apresiasi juga disampaikan kepada Sekretaris Utama BRIN, Ibu Nur Tri Aries Suestiningtyas, dan para pejabat tinggi serta pejabat pratama BRIN—Dr. Agus Eko Nugroho, Ibu Ratih Retno Wulandari, dan Ibu Yanuar Farida Wismayanti, Ph.D.—atas dukungan kelembagaan dalam memperkuat tata kelola, jejaring, dan keberlanjutan agenda riset kesejahteraan sosial.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada para kepala unit kerja, kolega, rekan peneliti, tenaga fungsional, dan mitra. Melalui diskusi, pertukaran gagasan, dan kerja kolaboratif lintas unit, disiplin, kementerian/lembaga, perguruan tinggi, dan komunitas, pengetahuan dibangun, diuji, serta diarahkan agar riset kesejahteraan sosial semakin responsif, berdampak, dan berkeadilan—sejalan dengan semangat orkestrasi ekosistem riset dan kebijakan.

Rasa hormat dan terima kasih disampaikan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia beserta para Menteri Sosial, pejabat, dan seluruh rekan kerja terutama di Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial di pusat maupun di daerah, atas kepercayaan dan ruang pengabdian selama lebih

dari tiga dekade yang memungkinkan pembelajaran langsung dari dinamika kebijakan dan realitas sosial masyarakat.

Secara khusus, terima kasih yang tak terhitung disampaikan kepada keluarga tercinta—istri, anak, menantu, cucu, dan seluruh keluarga besar—atas doa, kesabaran, pengertian, dan dukungan yang menjadi sumber keteguhan dalam perjalanan pengabdian ini.

Apresiasi juga disampaikan kepada Panitia Pelaksana Pengukuhan Profesor Riset BRIN atas kerja yang profesional dan penuh ketulusan, serta kepada seluruh hadirin atas waktu, perhatian, dan kehadiran yang berharga.

Semoga orasi ini dapat memberikan kontribusi bagi ikhtiar bersama dalam memperkuat riset sebagai dasar kebijakan terbukti, meneguhkan ilmu sebagai cahaya peradaban, dan menghadirkan kesejahteraan sosial sebagai wajah kemanusiaan yang berkeadaban—dalam semangat kerja kolektif, kemitraan, dan komitmen terhadap keadilan sosial.

*Alhamdulillah rabbil 'aalamiin.*

*Wabillaahit taufiq wal hidaayah.*

*Wassalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*



## DAFTAR PUSTAKA

- Alkire, S. (2005). Why the Capability Approach? *Journal of Human Development*, 6(1), 115–135. <https://doi.org/10.1080/146498805200034275>
- Alkire, S. (2015). *The capability approach and well-being measurement for public policy* (OPHI Working Paper No. 94). Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI), Oxford Department of International Development, Queen Elizabeth House (QEH), University of Oxford. ISSN 2040-8188; ISBN 978-19-0719-481-8.
- Andreasson, U., & Stigendal, M. (2020). *Digital welfare state in the Nordics: Prospects and challenges*. Nordic Council of Ministers.
- Arifin, J., Muhtar, B., Budianto, B., Sabarisman, M., As'adhanayadi, B., **Nuryana, M.**, & Purwasantana, D. (2021d). *Pencegahan stunting terintegrasi melalui bantuan sosial program sembako dan pendampingan sosial program keluarga harapan: Pembelajaran dari enam kabupaten prioritas*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- ASEAN Secretariat. (2022). *ASEAN regional framework and action plan to implement the ASEAN declaration on strengthening social protection*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Asante, A. D., Wiseman, V., Hayen, A., Haemmerli, M., Susilo, D., Satrya, A., ... Jan, S. (2023). The benefits and burden of health financing in Indonesia: Analyses of benefit and financing incidence. *The Lancet Global Health*, 11(5), e770–e780. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(23\)00064-5](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(23)00064-5)

- Badan Pusat Statistik. (2024, June 20). BPS hadiri peluncuran kolaborasi pemanfaatan sistem data Regsosek. <https://www.bps.go.id/id/news/2024/06/20/570/bps-hadiri-peluncuran-kolaborasi-pemanfaatan-sistem-data-regsosek.html>
- Bittencourt, B. A., Helale, J., Visentini, A. L. F., & Martins, W. (2025, Jan./Apr.). The role of individual orchestrators of innovation hubs: A multiple case study in the south of Brazil. *International Journal of Innovation - IJI*, São Paulo, 13(1), p. 1-30, e27160. <https://doi.org/10.5585/2025.27160>
- Bornbaum, C. C., Kornas, K., Peirson, L., & Rosella, L. C. (2015). Exploring the function and effectiveness of knowledge brokers as facilitators of knowledge translation in health-related settings: A systematic review and thematic analysis. *Implementation Science*, 10, 162. (BioMed Central)
- BPS. (2025, July 25). Berita Resmi Statistik – Gini ratio Maret 2025 tercatat sebesar 0,375. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/2519/gini-ratio-maret-2025-tercatat-sebesar-0-375.html>
- BPS. (2024, December 31). *Statistics of aging population 2024*. <https://www.bps.go.id/en/publication/2024/12/31/a00d4477490caaf0716b711d/statistik-penduduk-lanjut-usia-2024.html>
- Burström, T., Lahti, T., Parida, V., Wartiovaara, M., & Wincent, J. (2023). A definition, review, and extension of global ecosystems theory: Trends, architecture and orchestration of global VCs and mechanisms behind unicorns. *Journal of Business Research*, 157, 113605. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.113605>
- Cahyadi, N., Hanna, R., Olken, B. A., Prima, R. A., Satriawan, E., & Syamsulhakim, E. (2020). Cumulative impacts of conditional cash transfer programs: Experimental evidence from Indonesia. *American Economic Journal: Economic Policy*, 12(4), 88–110. <https://doi.org/10.1257/pol.20190245>

- Cairney, P., & Oliver, K. (2017). Evidence-based policymaking is not like evidence-based medicine, so how far should you go to bridge the divide between evidence and policy? *Health Research Policy and Systems*, 15, 35. <https://doi.org/10.1186/s12961-017-0192-x>
- Cheng, Q., Asante, A., Susilo, D., Satrya, A., Man, N., Fattah, R. A., ... Wiseman, V. (2022). Equity of health financing in Indonesia: A 5-year financing incidence analysis (2015–2019). *The Lancet Regional Health – Western Pacific*, 21, 100400. <https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2022.100400>
- Damschroder, L. J., et al. (2009). Fostering implementation of health services research findings into practice: A consolidated framework for advancing implementation science (CFIR). *Implementation Science*, 4, 50. <https://doi.org/10.1186/1748-5908-4-50>
- De, A., Kalavagunta, A., Gorton, M., & Goswami, M. (2024). Beyond profit margins: Orchestrating social, economic, and environmental sustainability within the Norwegian salmon food supply chain. *Journal of Environmental Management*, 366, 121914.
- Ferenhof, H. A., & de Sousa, M. P. A. (2022). Chapter 3: Scientific community-driven ecosystem as a supporter to co-create and co-evolute science. In *Emerging ecosystem-centric business models for sustainable value creation*. IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-4843-1.ch003>
- Fuady, A., Anindhita, M., Haniifah, M., Ahsan, A., Sugiharto, A., Haya, M. A. N., ... Widyahening, I. S. (2024). Bridging the gap: Financing health promotion and disease prevention in Indonesia. *Health Research Policy and Systems*, 22, 146.
- Fuady, A., Anindhita, M., Hanifah, M., Putri, A. M. N., Karnasih, A., Agiananda, F., ... Wingfield, T. (2025). Codeveloping a community-based, peer-led psychosocial support intervention to reduce stigma and depression among people with tuberculosis and their households in Indonesia: A mixed-methods participatory action study. *npj Primary Care Respiratory Medicine*, 35, 7.

- Handayani, T. (2020). Digitalisasi data sosial dalam pelayanan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Sosial dan Kesejahteraan Indonesia*, 12(2), 101–118.
- Havinga, F., Mahdad, M., & Dolfisma, W. (2023). Unpacking ecosystem dynamics in the construction industry: The transition toward circular construction ecosystems. *Journal of Cleaner Production*, 414, 137455.
- Henman, P. (2020). Digital social policy: Technological change and welfare futures. *Journal of Social Policy*, 49(1), 1–19.
- HM Treasury. (2020, updated). *Magenta Book—Supplementary guide: Realist evaluation*. GOV.UK.
- Jakarta Smart City. (2020, 7 Mei). Perjalanan gerakan #BantuSesama melalui platform KSBB.
- <https://smartcity.jakarta.go.id/id/blog/perjalanan-gerakan-bantusesama-melalui-platform-ksbb/>
- Jayaputra, A., **Nuryana, M.**, Pujianto, B., Muhtar, Sabarisman, M., Purwasantana, D., Arifin, J., Subur, A. M., Firmansyah, R., & As'adhanayadi, B. (2021c). *Evaluasi bantuan sosial program sembako bagi keluarga penerima manfaat* (Cetakan I, November 2021). Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Job Market Finland/KEHA Centre. (2025, 3 Juni). *National One-Stop Guidance Center youth feedback 2024*. <https://tyomarkkinatori.fi/en/employment-and-statistics/evaluation-and-research/monitoring-of-multisectoral-services/one-stop-guidance-center/national-one-stop-guidance-center-youth-feedback-2024>
- Kardeti, D. (2020). *Perlindungan sosial terpadu dalam penanganan kemiskinan (Studi Kasus SLRT Sabilulungan & PUSKESOS Kabupaten Bandung*. Disertasi, Universitas Padjadjaran, Tidak Dipublikasikan.

<https://repository.unpad.ac.id/server/api/core/bitstreams/54892cb0-50a7-4d77-868f-63b7d02fb6aa/content>

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2024, May 21). *Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)*.

<https://ppid.kemencopmk.go.id/inovasi-ppid/inovasi-detail/pensasaran-percepatan-penghapusan-kemiskinan-ekstrem-p3ke>

Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Ringkasan Eksekutif RPJMN IV 2020–2024*.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (BN 2018/187)*. <https://jdih.kemensos.go.id/detail/Peraturan-Menteri-Sosial-Republik-Indonesia-Nomor-1-Tahun-20-0f74242f-a>

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)*.

<https://jdih.kemensos.go.id/detail/Peraturan-Menteri-Sosial-Republik-Indonesia-Nomor-3-Tahun-20-0f98197f-a>

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan Program Perlindungan Sosial dan DTKS 2022*.

Kementerian Sosial RI. (2020). *Pedoman umum pelaksanaan SLRT dan Puskesmas*.

<https://dinsos.lampungprov.go.id/berkas/uploads//files/4/PEDUM/PEDOMAN%20UMUM%20SISTEM%20PELAYANAN%20RUJUKAN%20TERPADU%202020.pdf> — lihat terutama kemitraan pemerintah–dunia usaha–masyarakat dan dashboard partisipasi (pp. 1, 15–17).

Kementerian Sosial RI. (2024). *Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang DTKS (Januari 2024)*.

<https://peraturan.bpk.go.id/Download/340297/Kepmensos%2010%20tahun%202024.pdf>

- Könnölä, T., Eloranta, V., Turunen, T., & Salo, A. (2021). Transformative governance of innovation ecosystems. *Technological Forecasting & Social Change*, 173, 121106. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121106>
- Læg Reid, P., & Rykkja, L. H. (2014). One-stop-shops for social welfare: The NAV office in Norway. In P. Læg Reid, K. Sarapuu, L. H. Rykkja, & T. Randma-Liiv (Eds.), *Organizing for coordination in the public sector* (pp. 78–90). Palgrave Macmillan.
- [https://doi.org/10.1057/9781137359636\\_7](https://doi.org/10.1057/9781137359636_7)
- Lepri, B., Oliver, N., Letouzé, E., Pentland, A., & Vinck, P. (2016). *The tyranny of data? The bright and dark sides of data-driven decision-making for social good*. <https://arxiv.org/abs/1612.00323>
- Levy, K., Barocas, S., & Gates, K. (2021). Algorithms and decision-making in the public sector. *Annual Review of Law and Social Science*, 17(1), 309–334.
- Mann, C., Loft, L., & Hernández-Morcillo, M. (2021). Assessing forest governance innovations in Europe: Needs, challenges and ways forward for sustainable forest ecosystem service provision. *Ecosystem Services*, 52, 101384.
- Midgley, J. (2014). *Social development*. SAGE Publications.
- Midgley, J. (2020). *Social development: Theory and practice*. Sage Publications.
- National Association of Social Workers, Association of Social Work Boards, Council on Social Work Education, & Clinical Social Work Association. (2017). *Standards for technology in social work practice*. NASW. <https://www.socialworkers.org/Practice/NASW-Practice-Standards-Guidelines/Standards-for-Technology-in-Social-Work-Practice>

- Nonthasoot, S., Tan Kok Tong, R., Pa, P., Damanik, T., Kittavong, V., Bon Tai Soon, E., Set Aung, M., Cruz, J. P., Su-Mei Michelle, L., Nha, N. T., Nasrullah-Hakiem, M., Yeap, M., **Nuryana, M.**, Basarudin, N. B. M., Yee, K. S., Villar, F. R., Sriarkha, S., Duc, H. T. M., Paryani, Y. F., & Jayagupta, R. (2019). *ASEAN enabling masterplan 2025: Mainstreaming the rights of persons with disabilities*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Nugroho, A. (2023). Smart governance dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial: Studi implementasi DTKS. *Jurnal Kebijakan dan Inovasi Publik*, 8(1), 55–70.
- Nuryana, M.** (1991). Bab I Pendahuluan. Dalam **M. Nuryana, S. Istiani, & R. Dahlan** (Eds.), *Pelaksanaan program pemugaran perumahan dan lingkungan desa secara terpadu (P2LDT) di Kabupaten Bogor Jawa Barat* (hlm. 1–7). Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Nuryana, M.** (1995). Agricultural labor migration in West Java: An exploratory study from a rural village in Cirebon. *Journal of Agricultural Development Studies*, 6(1), 25–34.
- Nuryana, M.** (1996). Rural Javanese in an economy undergoing transformation – Profile of a rural village of the rice growing area in Cirebon. *Journal of Agricultural Development Studies*, 7(1), 21–28.
- Nuryana, M.** (1997). Determinants of temporary out-migration in West Java. *Journal of Agricultural Development Studies*, 8(1). (October 1997).
- Nuryana, M.** (1998a). Analysis on causes and consequences of temporary out-migration: A case study of rice village in West Java. *Unpublished master's thesis*. Chiba: Chiba University.
- Nuryana, M.** (1998b). Ngadon dan distribusi pendapatan/lahan pertanian – Studi kasus di desa pertanian tanaman pangan Jawa Barat. In *Proceedings Agri-Bioche, The Second Symposium on*

*Agricultural Sciences and Biochemical Engineering, Agriculture and Biotechnology Development and Environmental Issues* (pp. 33–38). Tokyo, Japan.

- Nuryana, M.** (1998c). Prospek pemberdayaan lumbung desa di daerah pedesaan – Tinjauan terhadap fungsi dan peranannya dalam penanggulangan bahaya kelaparan. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 3(3), 68–82.
- Nuryana, M.** (1998d). Transformation of the Javanese rural societies – A case study of temporary out-migration in the rice-growing area in Cirebon. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 08, 41–62.
- Nuryana, M.** (1999a). Logical framework: Alat untuk rancangan, persiapan dan evaluasi proyek sektor sosial. *Informasi Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 4(2), 8–24.
- Nuryana, M.** (Ed.). (1999c). *Penelitian dampak sosial psikologis korban kerusuhan: Studi kasus di Empat Lokasi Penampungan Pengungsi di Indonesia Tahun 1999/2000*. Jakarta: Departemen Sosial RI, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- Nuryana, M.** (2000). The impact of economic crisis on the factory worker's household in Cimaranggi village, Bandung. In S. Hirose (Ed.), *Studies on sustainable management of local resources* (pp. 131–138). Tokyo: College of Bioresource Sciences, Nihon University.
- Nuryana, M.,** Mudjiono, M., Herawati, I., Mujiyadi, B., Huruswati, I., Sutaat, N., Widodo, N., & Gunawan. (2001a). *Pelayanan panti sosial asuhan anak dalam rangka menyiapkan anak asuh menjadi sumber daya manusia berkualitas*. Jakarta: Kantor Masalah-Masalah Kemasyarakatan, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia.

- Nuryana, M.**, Mudjiono, M., Mujiyadi, B., Syawie, M., Basuki, U., Sugiharto, S., Sumarno, S., Masngudin, M., & Pranolo, A. B. (2001). *Laporan studi sistem ketahanan sosial masyarakat di daerah rawan konflik*. Jakarta: Kantor Masalah-Masalah Kemasyarakatan, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia.
- Nuryana, M.**, Santoso, U. R., Sukoco, D. H., Astuti, M., Zuhri, & Yuliah, D. (Eds.). (2002a). *Membangun konsepsi dan strategi ketahanan sosial masyarakat*. Jakarta: Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Nuryana, M.** (2002b). Perspektif social capital dalam pengembangan ketahanan sosial masyarakat. Dalam **M. Nuryana**, U. R. Santoso, D. H. Sukoco, M. Astuti, M. Zuhri, & D. Yuliah (Eds.), *Membangun Konsepsi & Strategi Ketahanan Sosial Masyarakat* (hlm. 1–10). Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Nuryana, M.** (2002c). Peranan organisasional pekerja sosial dalam mengatasi masalah sosial di Indonesia. *Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 7(4), 11–12.
- Nuryana, M.** (2002d). Peranan social capital sebagai piranti sosial komunitas dilihat dari dimensi teoritis dan empiris. *Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 7(2), 17–33.
- Nuryana, M.** (2002f). Internalisasi etika dan tanggung jawab sosial dunia usaha pada korporasi. *Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 7(3), 70–81.
- Nuryana, M.** (2003a). Kebijakan pelayanan dalam rumah bagi lanjut usia di Jepang: Pelajaran untuk Indonesia. *Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 8(4), 1–8.

- Nuryana, M.** (Ed.). (2003b). *Pola rekonsiliasi masyarakat antar-etnis di daerah konflik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Nuryana, M.** (2003c). Bab 1 Kehidupan multietnis, bahaya konflik, dan rekonsiliasi. Dalam **M. Nuryana** (Ed.), *Pola rekonsiliasi masyarakat antar-etnis di daerah konflik di Indonesia* (hlm. 1–10). Jakarta: Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial, Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Nuryana, M.** (2003d). Bab 2 Masyarakat menangani konflik antar-etnis di Sidoarjo. Dalam **M. Nuryana** (Ed.), *Pola rekonsiliasi masyarakat antar-etnis di daerah konflik di Indonesia* (hlm. 11–88). Jakarta: Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Nuryana, M.** (2003e). Pengembangan program pembangunan masyarakat desa di era otonomi daerah. *Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 8(2), 1–16.
- Nuryana, M.** (2003g). Membangun community policing melalui kemitraan polisi–komunitas. *Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 8(3), 1–13.
- Nuryana, M.** (2003h). Bab 5 Dampak sosial penutupan lokalisasi – Kasus Sunan Kuning Semarang. Dalam **M. Nuryana** (Ed.), *Permasalahan Kesejahteraan Sosial Pasca Penutupan Lokalisasi WTS di Beberapa Kota Besar* (hlm. 73–102). Jakarta: Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Nuryana, M.** (2003i). Pemberdayaan pranata sosial: Tinjauan teoritis dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial. *Informasi Kajian*

*Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 8(1), 8–25.

**Nuryana, M.** (2003j). Kata pengantar. Dalam **M. Nuryana** (Ed.), *Pola rekonsiliasi masyarakat antar-etnis di daerah konflik di Indonesia* (pp. ix–x). Jakarta: Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.

**Nuryana, M.**, Nugroho, B., Imansyah, H., Sasanti, A. M., & Kriptianti, K. (2003p). *Kebijakan, strategi, dan program kerjasama lintas sektor dan dunia usaha. Seri Pedoman Umum Pemberdayaan Sosial, Kerjasama Lintas Sektor Dunia Usaha*. Jakarta: Direktorat Peningkatan Peran Kelembagaan Sosial Masyarakat dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.

**Nuryana, M.**, Mujiyadi, B., Sutaat, Kironosasi, E., Huruswati, I., Widodo, N., & Gunawan. (2003). *Survey on accessibility problems to pantis and vocational rehabilitation service after decentralization in Indonesia*. Jakarta: JICA (Japan International Cooperation Agency) & Kandidat (Institute for Research, Training, and Social Welfare Services).

**Nuryana, M.** (2004a). Kebijakan pencegahan pelecehan seksual terhadap anak: Masukan bagi praktisi sosial. *Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 9(1), 46–58.

**Nuryana, M.**, & Nainggolan, T. (2004g). Bagian 1 Masalah trafficking di daerah asal, transit dan tujuan di Indonesia. Dalam M. Nuryana (Ed.), *Faktor-faktor terkait dengan perdagangan orang di Indonesia* (hlm. 1–29). Jakarta: Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial, Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.

**Nuryana, M.**, & Nainggolan, T. (2004h). Bagian 3 Masalah trafficking di Kabupaten Indramayu sebagai daerah asal. Dalam **M. Nuryana**

- (Ed.), *Faktor-faktor terkait dengan perdagangan orang di Indonesia* (hlm. 68–114). Jakarta: Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial, Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Nuryana, M., & Beke, A. D.** (2004i). Masalah trafficking di Kota Batam sebagai daerah transit/tujuan. Dalam **M. Nuryana** (Ed.), *Faktor-faktor terkait dengan perdagangan orang di Indonesia* (hlm. 30–67). Jakarta: Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial, Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Nuryana, M.** (Ed.). (2004f). *Faktor-faktor terkait dengan perdagangan orang di Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial, Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Nuryana, M.** (2004d). Masalah lokalisasi dan pemecahannya. Dalam **M. Nuryana** (Ed.), *Permasalahan Kesejahteraan Sosial Pasca Penutupan Lokalisasi WTS di Beberapa Kota Besar* (hlm. 1–7). Jakarta: Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial, Badan Pelatihan, dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Nuryana, M.** (2004e). Bab 8 Penutupan lokalisasi dan implikasi kebijakan dan praktis. Dalam **M. Nuryana** (Ed.), *Permasalahan Kesejahteraan Sosial Pasca Penutupan Lokalisasi WTS di Beberapa Kota Besar* (hlm. 177–182). Jakarta: Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial, Badan Pelatihan, dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Nuryana, M.** (2004j). Lessons learned dari trafficking dan implikasi kebijakan. Dalam **M. Nuryana** (Ed.), *Faktor-faktor terkait dengan perdagangan orang di Indonesia* (hlm. 182–204). Jakarta: Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial, Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.

- Nuryana, M.** (2004k). Kegagalan eksperimen sosial bernama lokalisasi. *Jurnal Aksi Sosial*, 1(1), 54–59.
- Nuryana, M.** (2004l). Dampak sosial penutupan lokalisasi. Dalam **M. Nuryana** (Ed.), *Permasalahan Kesejahteraan Sosial Pasca Penutupan Lokalisasi WTS di Beberapa Kota Besar* (hlm. 73–102). Jakarta: Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial, Badan Pelatihan, dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Nuryana, M.,** Suharto, E., Pujiyanto, B., Purnama, A. S., Thamrin, J., & Triyanto, I. (2004b). *Studi pelaksanaan jaminan sosial pada institusi lokal: Hasil studi di 10 provinsi*. Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Nuryana, M.** (2005a). Social accounting dan auditing bagi kinerja sosial perusahaan. *Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 10(1), 19–31.
- Nuryana, M.** (2005b). Perjalanan pekerja migran Indonesia dari desa hingga negara tujuan. Dalam **M. Nuryana** (Ed.), *Permasalahan sosial tenaga kerja wanita Indonesia* (hlm. 1–9). Jakarta: Departemen Sosial RI, Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial, Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial.
- Nuryana, M.** (2005d). Participatory action research: Sebuah kerangka kerja bagi action research dalam pengembangan komunitas dan pendidikan populer. *Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 10(2), 43–59.
- Nuryana, M.,** Sukoco, D. H., Nasution, A. A. U., Ardiyanto, S. D., Wahono, E., & Achmad, A. Y. (2005f). *Peran dan perjalanan departemen sosial dari masa ke masa*. Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia bekerjasama dengan PT DN Media.
- Nuryana, M.** (2006). Venture filantropi: Organisasi korporasi menanggapi persoalan sosial. *Galang Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani*, 1(2), 93–103.

- Nuryana, M.** (2007). Understanding corporate social responsibility in Indonesia: More actions less words. *Research and Presentation*, 19, 44–50.
- Nuryana, M.** (2008). Menjembatani riset dan kebijakan kesejahteraan sosial: Strategi diseminasi. *Buletin Perencanaan Departemen Sosial, III*, 1–5.
- Nuryana, M.** (2014). Bolsa Familia: Program transfer tunai bersyarat untuk pengurangan kemiskinan di Brazil. *Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 19(01), 79–90.
- Nuryana, M.** (2016a). Penanganan kemiskinan lintas-generasi untuk pemukiman padat di perkotaan: Place-conscious approach. Dalam R. Salam (Ed.), *Kemiskinan: Telaah konsep dan penerapannya* (hlm. 96–113). Jakarta: UMJ Press.
- Nuryana, M.** (2016b). Kemiskinan dan kekumuhan kota: Tinjauan dari perspektif global. Dalam R. Salam (Ed.), *Kemiskinan: Telaah konsep dan penerapannya* (hlm. 87–95). Jakarta: UMJ Press.
- Nuryana, M.** (2016c). Penanganan kemiskinan lintas generasi untuk pemukiman padat di perkotaan: Place-conscious approach. Dalam R. Salam (Ed.), *Penanggulangan kemiskinan perkotaan: Studi tentang usaha kelompok masyarakat* (hlm. 96–113). Jakarta: Mahara Publishing.
- Nuryana, M.** (2016d). Tantangan kewiraswastaan dalam kelompok usaha bersama di Indonesia. Dalam R. Salam (Ed.), *Penanggulangan kemiskinan perkotaan: Studi tentang usaha kelompok masyarakat* (hlm. 181–199). Jakarta: Mahara Publishing.
- Nuryana, M.** (2017b). How Indonesia plans to get its senior citizens active. *GovInsider* (January 26, 2017).

- Nuryana, M.** (2017c). Perusahaan sosial dan kelompok usaha bersama di Indonesia: Peluang dan tantangan. *Sosio Informa*, 3(02), 180–202.
- Nuryana, M.,** Setiawan H. H., Gustina, E., & Kuncoro, E. (2017a). Actions of governments for healthy development of children. *15th ASEAN & Japan High Level Officials Meeting on Caring Societies*, 31 October – 2 November 2017, Fukuoka, Japan. Japan Ministry of Health, Labour, and Welfare.
- Nuryana, M.,** Irmayani, N. R., Susantyo, B., Mujiyadi, B., Suradi, T. N., Nainggolan, T., Sugiyanto, H., & Habibullah. (2019a). *Arah baru pembangunan kesejahteraan sosial Indonesia 2020–2024*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia. <https://doi.org/10.33007/book.1> (ISBN: 9786025345982)
- Nuryana, M.** (2020b). Terapi robot bagi lanjut usia yang mengalami demensia. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 6(02), 133–151.
- Nuryana, M., & Amalia, A. D.** (2020a). Bab VI Pembahasan. Dalam **M. Nuryana** (Ed.), *Pembelajaran dari COVID-19: Masa depan kelompok usaha bersama (KUBE)* (hlm. 85–124). Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Nuryana, M.** (Ed.). (2020c). *Pembelajaran dari COVID-19: Masa depan kelompok usaha bersama (KUBE)*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Nuryana, M.** (2021b). Aspek pencegahan dan pengembangan dalam konteks kesejahteraan sosial. *Kegiatan Peer Review RUU Perubahan UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*,

Sekretariat Jenderal DPD RI, Hotel Mercure, Harmoni, Indonesia, 2–4 Juni 2021.

- Nuryana, M., & Setiati, S. (2021a).** Regional snapshot: Indonesia. In T. Aizan, A. W. Chan, C. Suankratay, J. Barrat, J. Jackson, M. O. Vinluan, ... T. B. Thuy (Eds.), *The decade of healthy ageing in ASEAN: Role of life-course immunisation* (pp. 28–30). EU-ASEAN Business Council; Western Pacific Pharmaceutical Forum (FIM); SANOFI; KPMG.
- Nuryana, M., Jayaputra, A., Sumarno, S., Yusamah, U. B., Patonah, S., Rahmat, P., & Haetami, T. (2022c).** *Pengembangan pelayanan sosial lanjut usia*. Jakarta: Mahara Publishing.
- Nuryana, M. (2022a).** Bab V Perubahan sosial suku Dani. Dalam M. Nuryana (Ed.), *Membina masyarakat pedalaman Irian Jaya: Pengalaman melakukan penelitian percontohan* (hlm. 171–238). Jakarta: Multi Inovasi Mandiri.
- Nuryana, M. (Ed.). (2022b).** *Membina masyarakat pedalaman Irian Jaya: Pengalaman melakukan penelitian percontohan*. Jakarta: Multi Inovasi Mandiri.
- Nuryana, M. (2022d).** Pengantar editor. Dalam M. Nuryana, A. Jayaputra, S. Sumarno, U. B. Yusamah, S. Patonah, P. Rahmat, & T. Haetami (Eds.), *Pengembangan pelayanan sosial lanjut usia* (hlm. iv–xxvi). Jakarta: Mahara Publishing.
- Nuryana, M. (2022e).** Bab I Tantangan rehabilitasi dalam penuaan masyarakat. Dalam **M. Nuryana, A. Jayaputra, S. Sumarno, U. B. Yusamah, S. Patonah, P. Rahmat, & T. Haetami (Eds.),** *Pengembangan pelayanan sosial lanjut usia* (hlm. 1–29). Jakarta: Mahara Publishing.
- Nuryana, M. (2022f).** Bab V Perubahan sosial suku Dani. Dalam **M. Nuryana (Ed.),** *Membina masyarakat pedalaman Irian Jaya: Pengalaman melakukan penelitian percontohan* (hlm. 171–238). Jakarta: Multi Inovasi Mandiri.

- Nuryana, M.,** Erwinsyah, R. G., & Suradi. (2023a). Strengthening society preparedness as a strategy for disaster risk reduction in Indonesia. In *The 1st Indonesia Conference on Environmental Management 2022 (ICEM2022)*. IOP Publishing, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1180, 012045. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1180/1/012045>
- Nuryana, M.** (2023b). Long-term care ditinjau dari perspektif global. Dalam N. Shamadiyah (Ed.), *Perawatan jangka-panjang: Perawatan kesehatan dan pelayanan sosial lanjut usia berbasis panti dan masyarakat* (hlm. 3–46). Jakarta: Mahara Publishing.
- Nuryana, M.** (2023c). Prolog: Perawatan jangka-panjang lanjut usia melalui panti dan non-panti. Dalam N. Shamadiyah (Ed.), *Perawatan jangka-panjang: Perawatan kesehatan dan pelayanan sosial lanjut usia berbasis panti dan masyarakat* (hlm. 1–2). Jakarta: Mahara Publishing.
- Nuryana, M.,** Nugroho, B., & Wahyutomo, B. (2004c). *Pemetaan tanggung jawab sosial dunia usaha: Potret corporate social responsibility (CSR) di delapan perusahaan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Nuryana, M.** (2002). Peranan social capital sebagai piranti sosial komunitas dilihat dari dimensi teoritis dan empiris. *Informasi: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 7(2). <https://doi.org/10.33007/inf.v7i2.906>
- Nuryana, M.** (2017). Perusahaan sosial dan KUBe di Indonesia: Peluang dan tantangan. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 3(2). <https://doi.org/10.33007/inf.v3i2.915>
- OECD. (2023). *Digital government review: Reimagining public services for the 21st century*.

- Ollivaud, P. (2017). *Improving the allocation and efficiency of public spending in Indonesia* (OECD Economics Department Working Papers No. 1381).
- Oliver, K., Innvær, S., Lorenc, T., Woodman, J., & Thomas, J. (2014). A systematic review of barriers to and facilitators of the use of evidence by policymakers. *BMC Health Services Research*, *14*, 2. <https://doi.org/10.1186/1472-6963-14-2>
- Osborne, S. P., Radnor, Z., & Strokosch, K. (2016). Co-production and the co-creation of value in public services: A suitable case for treatment? *Public Management Review*, *18*(5), 639–653. <https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1111927>; [https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/20623/1/Co-production\\_PMR\\_final.pdf](https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/20623/1/Co-production_PMR_final.pdf)
- Ozor, J., Ronde, P., Tung, S., & Boyer, J. (2024). The “middleground” as a catalyst for the dynamics of innovation in an ecosystem? The case of Eurasanté in Hauts-de-France. *Technological Forecasting & Social Change*, *209*, 123731. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123731>
- Ramírez-Altamirano, D. A., Sánchez-Medina, P. S., Díaz-Pichardo, R., & Suárez-Barraza, M. F. (2024). Transformational environmental leadership and corporate social responsibility as triggers of competitive advantage and sustainable performance in environmentally certified companies in Mexico. *Sustainability*, *16*(20), 8884. <https://doi.org/10.3390/su16208884>
- Robeyns, I. (2005). The Capability Approach: a theoretical survey. *Journal of Human Development*, *6*(1), 93–117. <https://doi.org/10.1080/146498805200034266>
- Rumble, L., Ramly, A. A., **Nuryana, M.**, & Dunne, M. P. (2018). The importance of contextual factors in carrying out childhood violence surveys: A case study from Indonesia. *Child Indicators Research*, *11*(2), 405–421. <https://doi.org/10.1007/s12187-017-9457-8>

- Rubiyano, H., Purwanto, A. B., Huruswati, I., Nurdin, A., **Nuryana, M.**, Togiartua, N., Sutaat, Suin, E., Ratnasari, A., Padmi, T. A., Priyatna, A., Utami, S., Jayapura, A., & Kurniasih, A. (2005). Bab 6 Korelasi antara kemiskinan dengan konflik sosial. Dalam N. Togiartua (Ed.), *Masalah sosial di Indonesia: Kondisi dan solusi. Seri Ringkasan Hasil Penelitian Edisi 2005* (hlm. 79–92). Departemen Sosial RI, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial.
- Rubiyanto, H., Purwanto, A. B., Huruswati, I., Nurdin, A., **Nuryana, M.**, Togiartua, N., Sutaat, Suin, E., Ratnasari, A., Padmi, T. A., Priyatna, A., Utami, S., Jayapura, A., & Kurniasih, A. (2005a). Bab 2 Perilaku remaja di daerah pinggiran kota. Dalam N. Togiartua (Ed.), *Masalah sosial di Indonesia: Kondisi dan solusi* (hlm. 16–28). Seri Ringkasan Hasil Penelitian Edisi 2005. Departemen Sosial Republik Indonesia, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial.
- Rubiyanto, H., Purwanto, A. B., Huruswati, I., Nurdin, A., **Nuryana, M.**, Togiartua, N., Sutaat, Suin, E., Ratnasari, A., Padmi, T. A., Priyatna, A., Utami, S., Jayapura, A., & Kurniasih, A. (2005a). Bab 4 Persepsi legislatif terhadap pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam N. Togiartua (Ed.), *Masalah sosial di Indonesia: Kondisi dan solusi* (pp. 47–60). Seri Ringkasan Hasil Penelitian Edisi 2005. Departemen Sosial RI, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial.
- Rubiyanto, H., Purwanto, A. B., Huruswati, I., Nurdin, A., **Nuryana, M.**, Togiartua, N., Sutaat, Suin, E., Ratnasari, A., Padmi, T. A., Priyatna, A., Utami, S., Jayapura, A., & Kurniasih, A. (2005b). Bab 1 Identifikasi faktor penghambat perkembangan potensi masyarakat lokal di daerah miskin. Dalam N. Togiartua (Ed.), *Masalah sosial di Indonesia: Kondisi dan solusi* (hlm. 1–15). Seri Ringkasan Hasil Penelitian Edisi 2005. Departemen Sosial RI, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial.

- Rubiyanto, H., Purwanto, A. B., Huruswati, I., Nurdin, A., **Nuryana, M.**, Togiartua, N., Sutaat, Suin, E., Ratnasari, A., Padmi, T. A., Priyatna, A., Utami, S., Jayapura, A., & Kurniasih, A. (2005b). Bab 5 Studi analisis munculnya daerah rawan seksual. Dalam N. Togiartua (Ed.), *Masalah sosial di Indonesia: Kondisi dan solusi. Seri Ringkasan Hasil Penelitian Edisi 2005* (hlm. 61–78). Departemen Sosial RI, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial.
- Rubiyanto, H., Purwanto, A. B., Huruswati, I., Nurdin, A., **Nuryana, M.**, Togiartua, N., Sutaat, Suin, E., Ratnasari, A., Padmi, T. A., Priyatna, A., Utami, S., Jayaputra, A., & Kurniasih, A. (2005). Bab 7 Desain pemberdayaan masyarakat nelayan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dalam N. Togiartua (Ed.), *Masalah sosial di Indonesia: Kondisi dan solusi* (hlm. 93–109). Seri Ringkasan Hasil Penelitian Edisi 2005. Departemen Sosial RI, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial.
- Rubyanto, H., Purwanto, A. B., Huruswati, I., Nurdin, A., **Nuryana, M.**, Nainggolan, T., Sutaat, E., Suin, A. R., Padmi, T., Priyatna, A., Utami, S., Jayaputra, A., & Kurniasari, A. (2005). *Masalah sosial di Indonesia: Kondisi dan solusi*. Seri Ringkasan Hasil Penelitian Edisi 2005. Jakarta: Departemen Sosial RI, Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial, Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial.
- Sumarno, S., Jayaputra, A., & **Nuryana, M.** (2020a). Bab VII Kesimpulan dan rekomendasi. Dalam M. Nuryana (Ed.), *Pembelajaran dari COVID-19: Masa depan kelompok usaha bersama (KUBE)* (hlm. 125–133). Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Sumarno, S., Jayaputra, A., & **Nuryana, M.** (2020d). Bab I Pendahuluan. Dalam M. Nuryana (Ed.), *Pembelajaran dari*

- COVID-19: Masa depan kelompok usaha bersama (KUBE)* (hlm. 1–17). Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Sumarno, S., Jayaputra, A., & **Nuryana, M.** (2020e). Bab VII Kesimpulan dan rekomendasi. Dalam **M. Nuryana** (Ed.), *Pembelajaran dari COVID-19: Masa depan kelompok usaha bersama (KUBE)* (hlm. 125–133). Kementerian Sosial RI.
- Satu Data Indonesia. (n.d.). *Data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)*. <https://data.go.id/dataset/dataset/data-p3ke>
- Sambodo, N. P., van Doorslaer, E., Pradhan, M., & Sparrow, R. (2021). Geographic spending variation and inequality in the benefits of curative care in Indonesia. *Health Policy and Planning*, *36*(7), 1129–1139. <https://doi.org/10.1093/heapol/czab015>
- Schultz, L., Folke, C., Österblom, H., & Olsson, P. (2015). Adaptive governance, ecosystem management, and natural capital. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, *112*(24), 7369–7374.
- Sen, A. (2009). *The idea of justice*. Harvard University Press.
- Setiaasih, R., Sunjaya, D. K., Sofiatin, Y., Afriandi, I., Hilfi, L., Herawati, D. M. D., et al. (2025). Readiness of health posts for primary health care integration in Indonesia: A mixed-methods study. *BMC Public Health*, *25*, 1429. <https://doi.org/10.1186/s12889-025-22520-x>
- Setiawan, H. H., **Nuryana, M.**, Susantyo, B., Purwanto, A. B., & Sulubere, M. B. (2021). Social entrepreneurship for beneficiaries of the Program Keluarga Harapan (PKH) toward sustainable development. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *739*(1), 012053. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/739/1/012053>

- Shirish, A., Srivastava, S. C., Panteli, N., & O'Shanahan, J. (2025). A knowledge-centric model for government-orchestrated digital transformation among the microbusiness sector. *The Journal of Strategic Information Systems*, 34(1), 101870. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2024.101870>
- Sirna, N., Cholilah, A., & **Nuryana, M.** (1990). *Penelitian tentang pelaksanaan kebijaksanaan pekerja sosial masyarakat di daerah*. Jakarta: Departemen Sosial RI, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- Soelaiman, H., **Nuryana, M.**, Dorkas, A., Rahman, Setiti, S. G., Sugiarto, Yuniati, Murni, R., Kurniasih, A., Huruswati, I., Dumonda, Kironosasi, E., Herawati, I., Utami, S., Unayah, N., Sutaat, Wiharjasasmita, U., Rupitawati, E., Irmayani, Hadi, S., Rubiyanto, H., Mujiyadi, B., Masngudin, Sitepu, A., Gunawan, Jayaputra, A., Toha, R., Sugiyanto, Basuki U., & Sabeni. (1999). *Survey dan pemetaan anak jalanan dan orang tuanya di tujuh kota besar di Jawa*. Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Sorri, K., Yrjönkoski, K., & Seppänen, M. (2024). Smart cities, smarter values: Unpacking the ecosystem of urban innovation. *Technology in Society*, 77, 102499.
- SMERU Research Institute, & MAHKOTA. (2020, February). *Strengthening economic opportunities for Program Keluarga Harapan families: A case study of four districts in Java*. [https://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/report-pkhstudy-en\\_final.pdf](https://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/report-pkhstudy-en_final.pdf). <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2024.101870>
- Sorrentino, M., Sicilia, M., & Howlett, M. (2018). Understanding co-production as a new public governance tool. *Policy & Society*, 37(3), 277–293. <https://doi.org/10.1080/14494035.2018.1521676>
- Stewart, F. (2013). *Capabilities and human development: Beyond the individual—the critical role of social institutions and social competencies*. United Nations Development Programme Human Development Report Office.

- Sumarno, S., Jayaputra, A., & Nuryana, M. (2020a). Bab VII Kesimpulan dan rekomendasi. Dalam M. Nuryana (Ed.), *Pembelajaran dari COVID-19: Masa depan kelompok usaha bersama (KUBE)* (hlm. 125–133). Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Sumarno, S., Jayaputra, A., & Nuryana, M. (2020d). Bab I Pendahuluan. Dalam M. Nuryana (Ed.), *Pembelajaran dari COVID-19: Masa depan kelompok usaha bersama (KUBE)* (hlm. 1–17). Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Sumarno, S., Jayaputra, A., & Nuryana, M. (2020e). Bab VII Kesimpulan dan rekomendasi. Dalam M. Nuryana (Ed.), *Pembelajaran dari COVID-19: Masa depan kelompok usaha bersama (KUBE)* (hlm. 125–133). Kementerian Sosial RI.
- Sumarto, M. (2017). Welfare regime change in developing countries: Evidence from Indonesia. *Social Policy & Administration*, 51(6), 940–959. <https://doi.org/10.1111/spol.12340>
- Sumarto, M. (2020). Insecurity and historical legacies in welfare regime change in Southeast Asia—Insights from Indonesia, Malaysia, and Thailand. *Social Policy and Society*, 19(4), 629–643. <https://doi.org/10.1017/S1474746420000299>
- Shirish, A., Srivastava, S. C., Panteli, N., & O'Shanahan, J. (2025). A knowledge-centric model for government-orchestrated digital transformation among the microbusiness sector. *The Journal of Strategic Information Systems*, 34(1), 101870. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2024.101870>
- Sorri, K., Yrjönkoski, K., & Seppänen, M. (2024). Smart cities, smarter values: Unpacking the ecosystem of urban innovation. *Technology in Society*, 77, 102499.

- Sutaat, & **Nuryana, M.** (2005c). Permasalahan Tenaga Kerja Wanita di Negara Tujuan: Permasalahan sosial pekerja migran Indonesia di shelter KBRI Kuala Lumpur. Dalam **M. Nuryana** (Ed.), *Permasalahan sosial tenaga kerja wanita Indonesia* (hlm. 217–251). Jakarta: Departemen Sosial RI, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- Tengku Aizan, T., Chan, A. W., Suankratay, C., Barrat, J., Jackson, J., Vinluan, M. O., **Nuryana, M.**, S. A., Setiati, S., Chunharas, S., Huyen, V. T. T., Kassim, A., Bommi, G., Chew, R., Perez III, J. A., Songkhla, T. N., Mittal, A., Wee, F., Chia, J., Balfour, J. B., Garcia-Lorenzo, M. F. G., Hanh, P. P., Kumtip, P., Aruntippaitune, S., Akinola, S., Potibutr, T., & Thuy, T. B. (2021). *The decade of healthy ageing in ASEAN: Role of life-course immunisation*. EU-ASEAN Business Council; Western Pacific Pharmaceutical Forum (FIM); SANOFI; KPMG.
- Tobing-David, V. E., Adi, I. R., & **Nuryana, M.** (2024). Conditions of Sustainable Welfare: A Cross-Case Empirical Analysis of 22 Locality-Based Welfare Systems in Decentralised Indonesia. *Sustainability*, 16(4), 1629. <https://doi.org/10.3390/su16041629>
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2021). *Leveraging digital technologies for social inclusion* (Policy Brief No. 92). UN DESA.
- UNDP. (2022). *Digital transformation in social protection: Guiding principles*. New York: UNDP.
- UNDP–OPHI. (2024). *Multidimensional Poverty Index 2024 – Indonesia*. <https://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/MPI2024/IDN.pdf>
- UNHCR, & IOM. (2024, March 22). UNHCR and IOM mobilize aid for Rohingya refugees following boat tragedy in Indonesia. <https://www.unhcr.org/id/en/news/press-releases/unhcr-and-iom-mobilize-aid-rohingya-refugees-following-boat-tragedy-indonesia>

- UNICEF Indonesia. (2024, March). *Integrating adaptive social protection into Indonesia's disaster risk financing and insurance strategy*. <https://www.unicef.org/indonesia/media/22936/file/Integrating-adaptive-social-protection-2024.pdf.pdf>
- UNESCO. (2018). *A global framework of reference on digital literacy skills for Indicator 4.4.2*. UNESCO Digital Library. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265403>
- UU No. 59 Tahun 2024 (RPJPN 2025–2045).
- van Erp, T., Carvalho, N. G. P., Gerolamo, M. C., Gonçalves, R. P., Rytter, N., & Gladysz, B. (2024). Industry 5.0: A new strategy framework for sustainability management and beyond. *Journal of Cleaner Production*, *461*, 142271. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.142271>
- Wang, S., Bai, X., van der Heijden, J., & Tong, X. (2024). The evolving roles of actors in sustainability experiments: Evidence from community waste management in a Chinese city. *Technological Forecasting & Social Change*, *204*, 123469. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123469>
- Wong, G., Westhorp, G., Manzano, A., Greenhalgh, J., Jagosh, J., & Greenhalgh, T. (2016). RAMESES II reporting standards for realist evaluations. *BMC Medicine*, *14*, 96. <https://doi.org/10.1186/s12916-016-0643-1>
- World Bank. (2020). *Indonesia public expenditure review: Spending for better results (Executive summary)*. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/348231590233772474-0070022020/render/IDPER2020ES.pdf>
- World Bank. (2024). *Investing in people: Social protection for Indonesia's 2045 vision*. <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/investing-in-people-social-protection-for-indonesia-2045-vision>

Zeng, J. (2022). Orchestrating ecosystem resources in a different country: Understanding the integrative capabilities of sharing economy platform multinational corporations. *Journal of World Business*, 57(6), 101347. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2022.101347>

## **DAFTAR CAPAIAN DALAM BIDANG IPTEK, RISET, DAN INOVASI**

### **Karya Tulis Ilmiah**

<b>Buku Internasional</b>	<b>2 buah</b>
<b>Buku Nasional</b>	<b>20 buah</b>
<b>Bagian dari Buku Internasional</b>	<b>2 buah</b>
<b>Bagian dari Buku Nasional</b>	<b>37 buah</b>
<b>Jurnal Internasional</b>	<b>9 buah</b>
<b>Jurnal Nasional</b>	<b>21 buah</b>
<b>Prosiding Internasional</b>	<b>1 buah</b>

## DAFTAR PUBLIKASI LAINNYA

1. **Nuryana, M.** (1998a). Analysis on causes and consequences of temporary out-migration: A case study of rice village in West Java. *Unpublished master's thesis*. Chiba: Chiba University.
2. **Nuryana, M.** (2021b). Aspek pencegahan dan pengembangan dalam konteks kesejahteraan sosial. Kegiatan Peer Review RUU Perubahan UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Sekretariat Jenderal DPD RI. *Paper seminar*. Hotel Mercure, Harmoni, Indonesia, 2-4 Juni 2021.
3. **Nuryana, M.,** Setiawan H. H., Gustina, E., & Kuncoro, E. (2017a). Actions of governments for healthy development of children. *15<sup>th</sup> ASEAN & Japan High Level Officials Meeting on Caring Societies*, 31 October - 2 November 2017, *Paper conference*. Fukuoka, Japan. Japan Ministry of Health, Labour, and Welfare.

# DAFTAR CAPAIAN DALAM BIDANG IPTEK, RISET, DAN INOVASI

## Karya Tulis Ilmiah

### Buku Internasional

1. Nonthasoot, S., Tan Kok Tong, R., Pa, P., Damanik, T., Kittavong, V., Bon Tai Soon, E., Set Aung, M., Cruz, J. P., Su-Mei Michelle, L., Nha, N. T., Nasrullah-Hakiem, M., Yeap, M., **Nuryana, M.**, Basarudin, N. B. M., Yee, K. S., Villar, F. R., Sriarkha, S., Duc, H. T. M., Paryani, Y. F., & Jayagupta, R. (2019). *ASEAN enabling masterplan 2025: Mainstreaming the rights of persons with disabilities*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
2. Tengku Aizan, T., Chan, A. W., Suankratay, C., Barrat, J., Jackson, J., Vinluan, M. O., **Nuryana, M.**, S. A., Setiati, S., Chunharas, S., Huyen, V. T. T., Kassim, A., Bommi, G., Chew, R., Perez III, J. A., Songkhla, T. N., Mittal, A., Wee, F., Chia, J., Balfour, J. B., Garcia-Lorenzo, M. F. G., Hanh, P. P., Kumtip, P., Aruntippaitune, S., Akinola, S., Potibutr, T., & Thuy, T. B. (2021). *The decade of healthy ageing in ASEAN: Role of life-course immunisation*. EU-ASEAN Business Council; Western Pacific Pharmaceutical Forum (FIM); SANOFI; KPMG.

### Buku Nasional

3. Arifin, J., Muhtar, B., Budiarto, B., Sabarisman, M., As'adhanayadi, B., **Nuryana, M.**, & Purwasantana, D. (2021d). *Pencegahan stunting terintegrasi melalui bantuan sosial program sembako dan pendampingan sosial program keluarga harapan: Pembelajaran dari enam kabupaten prioritas*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia.

4. Jayaputra, A., **Nuryana, M.**, Pujianto, B., Muhtar, Sabarisman, M., Purwasantana, D., Arifin, J., Subur, A. M., Firmansyah, R., & As'adhanayadi, B. (2021c). *Evaluasi bantuan sosial program sembako bagi keluarga penerima manfaat* (Cetakan I, November 2021). Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia.
5. **Nuryana, M.** (Ed.). (1999c). *Penelitian dampak sosial psikologis korban kerusuhan: Studi kasus di Empat Lokasi Penampungan Pengungsi di Indonesia Tahun 1999/2000*. Jakarta: Departemen Sosial RI, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
6. **Nuryana, M.**, Mudjiono, M., Herawati, I., Mujiyadi, B., Huruswati, I., Sutaat, N., Widodo, N., & Gunawan. (2001a). *Pelayanan panti sosial asuhan anak dalam rangka menyiapkan anak asuh menjadi sumber daya manusia berkualitas*. Jakarta: Kantor Masalah-Masalah Kemasyarakatan, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia.
7. **Nuryana, M.**, Mudjiono, M., Mujiyadi, B., Syawie, M., Basuki, U., Sugiharto, S., Sumarno, S., Masngudin, M., & Pranolo, A. B. (2001). *Laporan studi sistem ketahanan sosial masyarakat di daerah rawan konflik*. Jakarta: Kantor Masalah-Masalah Kemasyarakatan, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia.
8. **Nuryana, M.**, Santoso, U. R., Sukoco, D. H., Astuti, M., Zuhri, & Yuliah, D. (Eds.). (2002a). *Membangun konsepsi dan strategi ketahanan sosial masyarakat*. Jakarta: Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.
9. **Nuryana, M.** (Ed.). (2003b). *Pola rekonsiliasi masyarakat antar-etnis di daerah konflik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.

10. **Nuryana, M.**, Nugroho, B., Imansyah, H., Sasanti, A. M., & Kriptianti, K. (2003p). *Kebijakan, strategi, dan program kerjasama lintas sektor dan dunia usaha. Seri Pedoman Umum Pemberdayaan Sosial, Kerjasama Lintas Sektor Dunia Usaha*. Jakarta: Direktorat Peningkatan Peran Kelembagaan Sosial Masyarakat dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.
11. **Nuryana, M.**, Mujiyadi, B., Sutaat, Kironosasi, E., Huruswati, I., Widodo, N., & Gunawan. (2003). *Survey on accessibility problems to pants and vocational rehabilitation service after decentralization in Indonesia*. Jakarta: JICA (Japan International Cooperation Agency) & Kandidat (Institute for Research, Training, and Social Welfare Services).
12. **Nuryana, M.** (Ed.). (2004f). *Faktor-faktor terkait dengan perdagangan orang di Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial, Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.
13. **Nuryana, M.**, Suharto, E., Pujiyanto, B., Purnama, A. S., Thamrin, J., & Triyanto, I. (2004b). *Studi pelaksanaan jaminan sosial pada institusi lokal: Hasil studi di 10 provinsi*. Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.
14. **Nuryana, M.**, Sukoco, D. H., Nasution, A. A. U., Ardiyanto, S. D., Wahono, E., & Achmad, A. Y. (2005f). *Peran dan perjalanan departemen sosial dari masa ke masa*. Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia bekerjasama dengan PT DN Media.
15. **Nuryana, M.**, Irmayani, N. R., Susantyo, B., Mujiyadi, B., Suradi, T. N., Nainggolan, T., Sugiyanto, H., & Habibullah. (2019a). *Arah baru pembangunan kesejahteraan sosial Indonesia 2020–2024*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia. <https://doi.org/10.33007/book.1>

16. **Nuryana, M.** (Ed.). (2020c). *Pembelajaran dari COVID-19: Masa depan kelompok usaha bersama (KUBE)*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia.
17. **Nuryana, M.**, Jayaputra, A., Sumarno, S., Yusamah, U. B., Patonah, S., Rahmat, P., & Haetami, T. (2022c). *Pengembangan pelayanan sosial lanjut usia*. Jakarta: Mahara Publishing.
18. **Nuryana, M.** (Ed.). (2022b). *Membina masyarakat pedalaman Irian Jaya: Pengalaman melakukan penelitian percontohan*. Jakarta: Multi Inovasi Mandiri.
19. **Nuryana, M.**, Nugroho, B., & Wahyutomo, B. (2004c). *Pemetaan tanggung jawab sosial dunia usaha: Potret corporate social responsibility (CSR) di delapan perusahaan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.
20. Rubyanto, H., Purwanto, A. B., Huruswati, I., Nurdin, A., **Nuryana, M.**, Nainggolan, T., Sutaat, E., Suin, A. R., Padi, T., Priyatna, A., Utami, S., Jayaputra, A., & Kurniasari, A. (2005). *Masalah sosial di Indonesia: Kondisi dan solusi*. Seri Ringkasan Hasil Penelitian Edisi 2005. Jakarta: Departemen Sosial RI, Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial, Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial.
21. Sirna, N., Cholilah, A., & **Nuryana, M.** (1990). *Penelitian tentang pelaksanaan kebijaksanaan pekerja sosial masyarakat di daerah*. Jakarta: Departemen Sosial RI, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
22. Soelaiman, H., **Nuryana, M.**, Dorkas, A., Rahman, Setiti, S. G., Sugiarto, Yuniati, Murni, R., Kurniasih, A., Huruswati, I., Dumonda, Kironosasi, E., Herawati, I., Utami, S., Unayah, N., Sutaat, Wiharjasmita, U., Rupitawati, E., Irmayani, Hadi, S., Rubiyanto, H., Mujiyadi, B., Masngudin, Sitepu, A., Gunawan,

Jayaputra, A., Toha, R., Sugiyanto, Basuki U., & Sabeni. (1999). *Survey dan pemetaan anak jalanan dan orang tuanya di tujuh kota besar di Jawa*. Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia.

### **Bagian dari Buku Internasional**

23. **Nuryana, M.** (2000). The impact of economic crisis on the factory worker's household in Cimaranggi village, Bandung. In S. Hirose (Ed.), *Studies on sustainable management of local resources* (pp. 131–138). Tokyo: College of Bioresource Sciences, Nihon University.
24. **Nuryana, M., & Setiati, S.** (2021a). Regional snapshot: Indonesia. In T. Aizan, A. W. Chan, C. Suankratay, J. Barrat, J. Jackson, M. O. Vinluan, ... **M. Nuryana**, *The decade of healthy ageing in ASEAN: Role of life-course immunisation* (pp. 28–30). EU-ASEAN Business Council; Western Pacific Pharmaceutical Forum (FIM); SANOFI; KPMG.

### **Bagian dari Buku Nasional**

25. **Nuryana, M.** (1991). Bab I Pendahuluan. Dalam **M. Nuryana**, S. Istiani, & R. Dahlan (Eds.), *Pelaksanaan program pemugaran perumahan dan lingkungan desa secara terpadu (P2LDT) di Kabupaten Bogor Jawa Barat* (hlm. 1–7). Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.
26. **Nuryana, M.** (2002b). Perspektif social capital dalam pengembangan ketahanan sosial masyarakat. Dalam **M. Nuryana**, U. R. Santoso, D. H. Sukoco, M. Astuti, M. Zuhri, & D. Yuliah (Eds.), *Membangun Konsepsi & Strategi Ketahanan Sosial Masyarakat* (hlm. 1–10). Jakarta: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.

27. **Nuryana, M.** (2003c). Bab 1 Kehidupan multi-etnis, bahaya konflik, dan rekonsiliasi. Dalam **M. Nuryana** (Ed.), *Pola rekonsiliasi masyarakat antar-etnis di daerah konflik di Indonesia* (hlm. 1–10). Jakarta: Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial, Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.
28. **Nuryana, M.** (2003d). Bab 2 Masyarakat menangani konflik antar-etnis di Sidoarjo. Dalam **M. Nuryana** (Ed.), *Pola rekonsiliasi masyarakat antar-etnis di daerah konflik di Indonesia* (hlm. 11–88). Jakarta: Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.
29. **Nuryana, M.** (2003h). Bab 5 Dampak sosial penutupan lokalisasi – Kasus Sunan Kuning Semarang. Dalam **M. Nuryana** (Ed.), *Permasalahan Kesejahteraan Sosial Pasca Penutupan Lokalisasi WTS di Beberapa Kota Besar* (hlm. 73–102). Jakarta: Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.
30. **Nuryana, M.** (2003j). Kata pengantar. Dalam **M. Nuryana** (Ed.), *Pola rekonsiliasi masyarakat antar-etnis di daerah konflik di Indonesia* (pp. ix–x). Jakarta: Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.
31. **Nuryana, M., & Nainggolan, T.** (2004g). Bagian 1 Masalah trafficking di daerah asal, transit dan tujuan di Indonesia. Dalam **M. Nuryana** (Ed.), *Faktor-faktor terkait dengan perdagangan orang di Indonesia* (hlm. 1–29). Jakarta: Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial, Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.
32. **Nuryana, M., & Nainggolan, T.** (2004h). Bagian 3 Masalah trafficking di Kabupaten Indramayu sebagai daerah asal. Dalam **M. Nuryana** (Ed.), *Faktor-faktor terkait dengan perdagangan*

- orang di Indonesia* (hlm. 68–114). Jakarta: Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial, Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.
33. **Nuryana, M.**, & Beke, A. D. (2004i). Masalah trafficking di Kota Batam sebagai daerah transit/tujuan. Dalam **M. Nuryana** (Ed.), *Faktor-faktor terkait dengan perdagangan orang di Indonesia* (hlm. 30–67). Jakarta: Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial, Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.
  34. **Nuryana, M.** (2004d). Masalah lokalisasi dan pemecahannya. Dalam **M. Nuryana** (Ed.), *Permasalahan Kesejahteraan Sosial Pasca Penutupan Lokalisasi WTS di Beberapa Kota Besar* (hlm. 1–7). Jakarta: Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial, Badan Pelatihan, dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.
  35. **Nuryana, M.** (2004e). Bab 8 Penutupan lokalisasi dan implikasi kebijakan dan praktis. Dalam **M. Nuryana** (Ed.), *Permasalahan Kesejahteraan Sosial Pasca Penutupan Lokalisasi WTS di Beberapa Kota Besar* (hlm. 177–182). Jakarta: Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial, Badan Pelatihan, dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.
  36. **Nuryana, M.** (2004j). Lessons learned dari trafficking dan implikasi kebijakan. Dalam **M. Nuryana** (Ed.), *Faktor-faktor terkait dengan perdagangan orang di Indonesia* (hlm. 182–204). Jakarta: Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial, Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.
  37. **Nuryana, M.** (2004l). Dampak sosial penutupan lokalisasi. Dalam **M. Nuryana** (Ed.), *Permasalahan Kesejahteraan Sosial Pasca Penutupan Lokalisasi WTS di Beberapa Kota Besar* (hlm. 73–102). Jakarta: Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial, Badan Pelatihan, dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.

38. **Nuryana, M.** (2005b). Perjalanan pekerja migran Indonesia dari desa hingga negara tujuan. Dalam **M. Nuryana** (Ed.), *Permasalahan sosial tenaga kerja wanita Indonesia* (hlm. 1–9). Jakarta: Departemen Sosial RI, Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial, Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial.
39. **Nuryana, M.** (2016a). Penanganan kemiskinan lintas-generasi untuk pemukiman padat di perkotaan: Place-conscious approach. Dalam R. Salam (Ed.), *Kemiskinan: Telaah konsep dan penerapannya* (hlm. 96–113). Jakarta: UMJ Press.
40. **Nuryana, M.** (2016b). Kemiskinan dan kekumuhan kota: Tinjauan dari perspektif global. Dalam R. Salam (Ed.), *Kemiskinan: Telaah konsep dan penerapannya* (hlm. 87–95). Jakarta: UMJ Press.
41. **Nuryana, M.** (2016c). Penanganan kemiskinan lintas generasi untuk pemukiman padat di perkotaan: Place-conscious approach. Dalam R. Salam (Ed.), *Penanggulangan kemiskinan perkotaan: Studi tentang usaha kelompok masyarakat* (hlm. 96–113). Jakarta: Mahara Publishing.
42. **Nuryana, M.** (2016d). Tantangan kewiraswastaan dalam kelompok usaha bersama di Indonesia. Dalam R. Salam (Ed.), *Penanggulangan kemiskinan perkotaan: Studi tentang usaha kelompok masyarakat* (hlm. 181–199). Jakarta: Mahara Publishing.
43. **Nuryana, M., & Amalia, A. D.** (2020a). Bab VI Pembahasan. Dalam **M. Nuryana** (Ed.), *Pembelajaran dari COVID-19: Masa depan kelompok usaha bersama (KUBE)* (hlm. 85–124). Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia.
44. **Nuryana, M.** (2022a). Bab V Perubahan sosial suku Dani. Dalam **M. Nuryana** (Ed.), *Membina masyarakat pedalaman Irian Jaya:*

*Pengalaman melakukan penelitian percontohan* (hlm. 171–238). Jakarta: Multi Inovasi Mandiri.

45. **Nuryana, M.** (2022d). Pengantar editor. Dalam **M. Nuryana, A. Jayaputra, S. Sumarno, U. B. Yusamah, S. Patonah, P. Rahmat, & T. Haetami** (Eds.), *Pengembangan pelayanan sosial lanjut usia* (hlm. iv–xxvi). Jakarta: Mahara Publishing.
46. **Nuryana, M.** (2022e). Bab I Tantangan rehabilitasi dalam penuaan masyarakat. Dalam **M. Nuryana, A. Jayaputra, S. Sumarno, U. B. Yusamah, S. Patonah, P. Rahmat, & T. Haetami** (Eds.), *Pengembangan pelayanan sosial lanjut usia* (hlm. 1–29). Jakarta: Mahara Publishing.
47. **Nuryana, M.** (2022f). Bab V Perubahan sosial suku Dani. Dalam **M. Nuryana** (Ed.), *Membina masyarakat pedalaman Irian Jaya: Pengalaman melakukan penelitian percontohan* (hlm. 171–238). Jakarta: Multi Inovasi Mandiri.
48. **Nuryana, M.** (2023b). Long-term care ditinjau dari perspektif global. Dalam N. Shamadiyah (Ed.), *Perawatan jangka-panjang: Perawatan kesehatan dan pelayanan sosial lanjut usia berbasis panti dan masyarakat* (hlm. 3–46). Jakarta: Mahara Publishing.
49. **Nuryana, M.** (2023c). Prolog: Perawatan jangka-panjang lanjut usia melalui panti dan non-panti. Dalam N. Shamadiyah (Ed.), *Perawatan jangka-panjang: Perawatan kesehatan dan pelayanan sosial lanjut usia berbasis panti dan masyarakat* (hlm. 1–2). Jakarta: Mahara Publishing.
50. Rubiyano, H., Purwanto, A. B., Huruswati, I., Nurdin, A., **Nuryana, M.**, Togiaratua, N., Sutaat, Suin, E., Ratnasari, A., Padi, T. A., Priyatna, A., Utami, S., Jayapura, A., & Kurniasih, A. (2005). Bab 6 Korelasi antara kemiskinan dengan konflik sosial. Dalam N. Togiaratua (Ed.), *Masalah sosial di Indonesia: Kondisi dan solusi. Seri Ringkasan Hasil Penelitian Edisi 2005* (hlm. 79–92). Departemen Sosial RI, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial.

51. Rubiyanto, H., Purwanto, A. B., Huruswati, I., Nurdin, A., **Nuryana, M.**, Togiaratua, N., Sutaat, Suin, E., Ratnasari, A., Padi, T. A., Priyatna, A., Utami, S., Jayapura, A., & Kurniasih, A. (2005a). Bab 2 Perilaku remaja di daerah pinggiran kota. Dalam N. Togiaratua (Ed.), *Masalah sosial di Indonesia: Kondisi dan solusi* (hlm. 16–28). Seri Ringkasan Hasil Penelitian Edisi 2005. Departemen Sosial Republik Indonesia, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial.
52. Rubiyanto, H., Purwanto, A. B., Huruswati, I., Nurdin, A., **Nuryana, M.**, Togiaratua, N., Sutaat, Suin, E., Ratnasari, A., Padi, T. A., Priyatna, A., Utami, S., Jayapura, A., & Kurniasih, A. (2005a). Bab 4 Persepsi legislatif terhadap pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam N. Togiaratua (Ed.), *Masalah sosial di Indonesia: Kondisi dan solusi* (pp. 47–60). Seri Ringkasan Hasil Penelitian Edisi 2005. Departemen Sosial RI, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial.
53. Rubiyanto, H., Purwanto, A. B., Huruswati, I., Nurdin, A., **Nuryana, M.**, Togiaratua, N., Sutaat, Suin, E., Ratnasari, A., Padi, T. A., Priyatna, A., Utami, S., Jayapura, A., & Kurniasih, A. (2005b). Bab 1 Identifikasi faktor penghambat perkembangan potensi masyarakat lokal di daerah miskin. Dalam N. Togiaratua (Ed.), *Masalah sosial di Indonesia: Kondisi dan solusi* (hlm. 1–15). Seri Ringkasan Hasil Penelitian Edisi 2005. Departemen Sosial RI, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial.
54. Rubiyanto, H., Purwanto, A. B., Huruswati, I., Nurdin, A., **Nuryana, M.**, Togiaratua, N., Sutaat, Suin, E., Ratnasari, A., Padi, T. A., Priyatna, A., Utami, S., Jayapura, A., & Kurniasih, A. (2005b). Bab 5 Studi analisis munculnya daerah rawan seksual. Dalam N. Togiaratua (Ed.), *Masalah sosial di Indonesia: Kondisi dan solusi*. Seri Ringkasan Hasil Penelitian Edisi 2005 (hlm. 61–

- 78). Departemen Sosial RI, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial.
55. Rubiyanto, H., Purwanto, A. B., Huruswati, I., Nurdin, A., **Nuryana, M.**, Togiaratua, N., Sutaat, Suin, E., Ratnasari, A., Padi, T. A., Priyatna, A., Utami, S., Jayaputra, A., & Kurniasih, A. (2005). Bab 7 Desain pemberdayaan masyarakat nelayan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dalam N. Togiaratua (Ed.), *Masalah sosial di Indonesia: Kondisi dan solusi* (hlm. 93–109). Seri Ringkasan Hasil Penelitian Edisi 2005. Departemen Sosial RI, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial.
56. Sumarno, S., Jayaputra, A., & **Nuryana, M.** (2020a). Bab VII Kesimpulan dan rekomendasi. Dalam **M. Nuryana** (Ed.), *Pembelajaran dari COVID-19: Masa depan kelompok usaha bersama (KUBE)* (hlm. 125–133). Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia.
57. Sumarno, S., Jayaputra, A., & **Nuryana, M.** (2020d). Bab I Pendahuluan. Dalam **M. Nuryana** (Ed.), *Pembelajaran dari COVID-19: Masa depan kelompok usaha bersama (KUBE)* (hlm. 1–17). Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia.
58. Sumarno, S., Jayaputra, A., & **Nuryana, M.** (2020e). Bab VII Kesimpulan dan rekomendasi. Dalam **M. Nuryana** (Ed.), *Pembelajaran dari COVID-19: Masa depan kelompok usaha bersama (KUBE)* (hlm. 125–133). Kementerian Sosial RI.
59. Sumarno, S., Jayaputra, A., & **Nuryana, M.** (2020a). Bab VII Kesimpulan dan rekomendasi. Dalam **M. Nuryana** (Ed.), *Pembelajaran dari COVID-19: Masa depan kelompok usaha bersama (KUBE)* (hlm. 125–133). Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan,

Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia.

60. Sumarno, S., Jayaputra, A., & **Nuryana, M.** (2020d). Bab I Pendahuluan. Dalam **M. Nuryana** (Ed.), *Pembelajaran dari COVID-19: Masa depan kelompok usaha bersama (KUBE)* (hlm. 1–17). Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia.
61. Sutaat, & **Nuryana, M.** (2005c). Permasalahan Tenaga Kerja Wanita di Negara Tujuan: Permasalahan sosial pekerja migran Indonesia di shelter KBRI Kuala Lumpur. Dalam **M. Nuryana** (Ed.), *Permasalahan sosial tenaga kerja wanita Indonesia* (hlm. 217–251). Jakarta: Departemen Sosial RI, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.

### **Jurnal Internasional**

62. **Nuryana, M.** (1995). Agricultural labor migration in West Java: An exploratory study from a rural village in Cirebon. *Journal of Agricultural Development Studies*, 6(1), 25–34.
63. **Nuryana, M.** (1996). Rural Javanese in an economy undergoing transformation – Profile of a rural village of the rice growing area in Cirebon. *Journal of Agricultural Development Studies*, 7(1), 21–28.
64. **Nuryana, M.** (1997). Determinants of temporary out-migration in West Java. *Journal of Agricultural Development Studies*, 8(1).
65. **Nuryana, M.** (1998b). Ngadon dan distribusi pendapatan/lahan pertanian – Studi kasus di desa pertanian tanaman pangan Jawa Barat. In *Proceedings Agri-Bioche, The Second Symposium on Agricultural Sciences and Biochemical Engineering, Agriculture and Biotechnology Development and Environmental Issues* (pp. 33–38). Tokyo, Japan.

66. **Nuryana, M.** (2007). Understanding corporate social responsibility in Indonesia: More actions less words. *Research and Presentation*, 19, 44–50.
67. **Nuryana, M.** (2017b). How Indonesia plans to get its senior citizens active. *GovInsider* (January 26, 2017).
68. Rumble, L., Ramly, A. A., **Nuryana, M.**, & Dunne, M. P. (2018). The importance of contextual factors in carrying out childhood violence surveys: A case study from Indonesia. *Child Indicators Research*, 11(2), 405–421.
69. <https://doi.org/10.1007/s12187-017-9457-8>
70. Setiawan, H. H., **Nuryana, M.**, Susantyo, B., Purwanto, A. B., & Sulubere, M. B. (2021). Social entrepreneurship for beneficiaries of the Program Keluarga Harapan (PKH) toward sustainable development. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 739(1), 012053.
71. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/739/1/012053>
72. Tobing-David, V. E., Adi, I. R., & **Nuryana, M.** (2024). Conditions of Sustainable Welfare: A Cross-Case Empirical Analysis of 22 Locality-Based Welfare Systems in Decentralised Indonesia. *Sustainability*, 16(4), 1629.
73. <https://doi.org/10.3390/su16041629>

### **Jurnal Nasional**

74. **Nuryana, M.** (1998c). Prospek pemberdayaan lumbung desa di daerah pedesaan – Tinjauan terhadap fungsi dan peranannya dalam penanggulangan bahaya kelaparan. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 3(3), 68–82.
75. **Nuryana, M.** (1998d). Transformation of the Javanese rural societies – A case study of temporary out-migration in the rice-

growing area in Cirebon. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 08, 41–62.

76. **Nuryana, M.** (1999a). Logical framework: Alat untuk rancangan, persiapan dan evaluasi proyek sektor sosial. *Informasi Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 4(2), 8–24.
77. **Nuryana, M.** (2002c). Peranan organisasional pekerja sosial dalam mengatasi masalah sosial di Indonesia. *Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 7(4), 11–12.
78. **Nuryana, M.** (2002d). Peranan social capital sebagai piranti sosial komunitas dilihat dari dimensi teoritis dan empiris. *Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 7(2), 17–33.
79. **Nuryana, M.** (2002f). Internalisasi etika dan tanggung jawab sosial dunia usaha pada korporasi. *Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 7(3), 70–81.
80. **Nuryana, M.** (2003a). Kebijakan pelayanan dalam rumah bagi lanjut usia di Jepang: Pelajaran untuk Indonesia. *Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 8(4), 1–8.
81. **Nuryana, M.** (2003e). Pengembangan program pembangunan masyarakat desa di era otonomi daerah. *Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 8(2), 1–16.
82. **Nuryana, M.** (2003g). Membangun community policing melalui kemitraan polisi–komunitas. *Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 8(3), 1–13.
83. **Nuryana, M.** (2003i). Pemberdayaan pranata sosial: Tinjauan teoritis dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial. *Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 8(1), 8–25.

84. **Nuryana, M.** (2004a). Kebijakan pencegahan pelecehan seksual terhadap anak: Masukan bagi praktisi sosial. *Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 9(1), 46–58.
85. **Nuryana, M.** (2004k). Kegagalan eksperimen sosial bernama lokalisasi. *Jurnal Aksi Sosial*, 1(1), 54–59.
86. **Nuryana, M.** (2005a). Social accounting dan auditing bagi kinerja sosial perusahaan. *Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 10(1), 19–31.
87. **Nuryana, M.** (2005d). Participatory action research: Sebuah kerangka kerja bagi action research dalam pengembangan komunitas dan pendidikan populer. *Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 10(2), 43–59.
88. **Nuryana, M.** (2006). Venture filantropi: Organisasi korporasi menanggapi persoalan sosial. *Galang Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani*, 1(2), 93–103.
89. **Nuryana, M.** (2008). Menjembatani riset dan kebijakan kesejahteraan sosial: Strategi diseminasi. *Buletin Perencanaan Departemen Sosial*, III, 1–5.
90. **Nuryana, M.** (2014). Bolsa Familia: Program transfer tunai bersyarat untuk pengurangan kemiskinan di Brazil. *Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 19(01), 79–90.
91. **Nuryana, M.** (2017c). Perusahaan sosial dan kelompok usaha bersama di Indonesia: Peluang dan tantangan. *Socio Informa*, 3(02), 180–202.
92. **Nuryana, M.** (2020b). Terapi robot bagi lanjut usia yang mengalami demensia. *Socio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 6(02), 133–151.

93. **Nuryana, M.** (2002). Peranan social capital sebagai piranti sosial komunitas dilihat dari dimensi teoritis dan empiris. *Informasi: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 7(2).
94. <https://doi.org/10.33007/inf.v7i2.906>
95. **Nuryana, M.** (2017). Perusahaan sosial dan KUBe di Indonesia: Peluang dan tantangan. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 3(2).
96. <https://doi.org/10.33007/inf.v3i2.915>

### **Prosiding Internasional**

97. **Nuryana, M.,** Erwinsyah, R. G., & Suradi. (2023a). Strengthening society preparedness as a strategy for disaster risk reduction in Indonesia. In *The 1st Indonesia Conference on Environmental Management 2022 (ICEM2022)*. IOP Publishing, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1180, 012045.
98. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1180/1/012045>

### **Paper Konferensi**

99. **Nuryana, M.,** Setiawan H. H., Gustina, E., & Kuncoro, E. (2017a). Actions of governments for healthy development of children. *15th ASEAN & Japan High Level Officials Meeting on Caring Societies*, 31 October – 2 November 2017, Fukuoka, Japan. Japan Ministry of Health, Labour, and Welfare.

### **Paper Seminar**

100. **Nuryana, M.** (2021b). Aspek pencegahan dan pengembangan dalam konteks kesejahteraan sosial. Kegiatan Peer Review RUU Perubahan UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial,

Sekretariat Jenderal DPD RI, Hotel Mercure, Harmoni, Indonesia,  
2–4 Juni 2021. KKN

## **Tesis**

101. **Nuryana, M.** (1998a). Analysis on causes and consequences of temporary out-migration: A case study of rice village in West Java. *Unpublished master's thesis*. Chiba: Chiba University.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI

Nama : Mu'man Nuryana MSc., Ph.D.  
Tempat, Tanggal Lahir : Garut, 24 Februari 1957  
Anak ke : 1 dari 10 bersaudara  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Nama Ayah : Mochammad Chaerudin  
Kandung  
Nama Ibu : Siti Ating Maryati  
Kandung  
Nama Istri/ Suami : Dini Damayanti, S.S.  
Jumlah Anak : 3  
Nama Anak : Shitami Ambarsari, S.Psi.  
: Hitomi Hadinuryana, S.T., M.T.  
: Reika Athalia Nuryana, Dipl. in International Fashion Design  
Nama Unit : Pusat Riset Kebijakan Publik  
Nama Organisasi : Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat  
Nama Instansi : Badan Riset dan Inovasi Nasional  
Judul Orasi : Model Orkestrasi Ekosistem Untuk Kesejahteraan Sosial Inklusif Di Indonesia  
Ilmu : Sosiologi  
Bidang : Kesejahteraan Sosial  
Kepakaran : Perencanaan dan Kebijakan Sosial

No. SK : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor  
 Pangkat 53/K Tahun 2014 tanggal 1 April 2014  
 Terakhir

No. SK : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor  
 Peneliti Ahli 6/M Tahun 2017 tanggal 7 Februari 2017  
 Utama

Tautan Scopus : Scopus ID: 57201008879

Tautan Google : <https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=-Eq0T28AAAAJ>  
 Scholar

### **Pendidikan Formal**

<b>No</b>	<b>Jenjang</b>	<b>Nama Sekolah/ PT/Universitas</b>	<b>Tempat/Kota/ Negara</b>	<b>Tahun Lulus</b>
1.	SD	SD Muhammadiyah Garut	Garut/Indonesia	1969
2.	SMP	SMPN I Garut	Garut/Indonesia	1972
3.	SMA	SMA Muhammadiyah Garut	Garut/Indonesia	1976
4.	D1	-	-	-
5.	S1	Institut Pertanian Bogor	Bogor/Indonesia	1981
6.	S2	Chiba University	Chiba/Jepang	1995
7.	S3	Nihon University	Tokyo/Jepang	1998

## Pendidikan Nonformal

No	Nama Pelatihan/ Pendidikan	Tempat/Kota/ Negara	Tahun
1.	Program Pendidikan dan Latihan Analisa Proyek Pembangunan Angkatan XVII	LPEM-FE Universitas Indonesia /Jakarta/Indonesia	1989
2.	Traffic and Safety Sciences	IATSS (International Association of Traffic and Safety Sciences) Forum/ Suzuka/Japan	1989
3.	Diklatpim Tingkat IV (ADUM)	LAN/Jakarta/Indonesia	1999
4.	Diklatpim Tingkat III (SPAMA)	LAN/Jakarta/Indonesia	1999
5.	Modernizing the Policy Process	LAN-Department of International Development (United Kingdom)/Jakarta/ Indonesia	1999
6.	Diklatpim Tingkat II	LAN/Jakarta/Indonesia	2001
7.	Short-term Training Course of Social Welfare Policy and Practice	Japan College of Social Work/Tokyo/Japan	2005
8.	Diklatpim Tingkat I	LAN/Jakarta/Indonesia	2008
9.	Follow-up Workshop: International Leadership Training Social Security	GIZ/Denpasar/Indonesia	2008

10.	Training-Workshop on South-South Technical Cooperation: Indonesia Experiences	GOI-JICA, Non-Aligned Movement Centre for South-South Technical Cooperation (NAM-CSSTC)/Jakarta/Indonesia	2009
11.	Short-course on Strategic Management Component A – Australia Development Scholarship	The University of Queensland/Brisbane/Australia	2012
12.	Training-Workshops on the Japanese National Disaster Management Policy/Framework and Disaster Victim Stress Management	National Shinshu University-Nihon University (Faculty of Risk Management)- Musashigaoka College-CEMIJ (Community Emergency Management Institute Japan)-Ministry of Health, Labour and Welfare, Ministry of Land, Infrastructure-Office of the Cabinet of the Japanese Government/Tokyo/Japan	2015

### Jabatan Struktural

No	Jabatan/Pekerjaan	Nama Instansi	Tahun
1.	Kepala Seksi Perencanaan Program	Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial Republik, Jakarta, Indonesia	1998 –1998

No	Jabatan/Pekerjaan	Nama Instansi	Tahun
2.	Kepala Bagian Evaluasi dan Laporan Hasil Penelitian	Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial Republik, Jakarta, Indonesia	1999–1999
3.	Asisten Deputi Urusan Aspek Sosial Politik	Kementerian Negara Masalah-Masalah Kemasyarakatan/Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN)	2000–2001
4.	Kepala Biro Perencanaan	Kementerian Sosial RI	2006–2012
5.	Sekretaris Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	Kementerian Sosial RI	2012–2013
	Staf Ahli Bidang Dampak Sosial	Kementerian Sosial RI	2013–2013
	Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	Kementerian Sosial RI	2014–2017
	Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial	Kementerian Sosial RI	2017–2017

### Jabatan Fungsional

No	Jenjang Jabatan	TMT Jabatan
1.	Ajun Peneliti Muda III/d	14 Februari 2001
2.	Ahli Peneliti Madya IV/b	1 Mei 2005
3.	Peneliti Utama IV/e	7 Februari 2017

## Penugasan Khusus Nasional/Internasional

No	Jabatan/Pekerjaan	Pemberi Tugas	Tahun
1.	Merancang dan implementasi kerjasama bilateral	Menteri Sosial	2006– 2017
2.	ASEAN SOMSWD (Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development) Focal Point Indonesia	Menteri Sosial – ASEAN Secretariat	2014– 2017
4.	Indonesia Australia Scholarships Development Phase III (Senior Liaison Officer)	Kementerian Sosial- Sekretariat Negara- DFAT Kedutaan Besar Australia	2014– 2014
3.	Chair SOMSWD	Menteri Sosial-ASCC ASEAN Secretariat	2015– 2016

## Keikutsertaan Dalam Kegiatan Ilmiah

No	Nama Kegiatan	Peran/Tugas	Penyelenggara (Kota, Negara)	Tahun
1.	The Second Symposium on Agricultural Sciences and Biochemical Engineering (Agri-Bioche'98).	Presenter	The Indonesian Agricultural Sciences Association, the Indonesian Biochemical Engineering Association, Tokyo, Japan	1998
2.	National Workshop on Violence Prevention and Conflict Resolution, UNICEF, Jakarta, 2001	Active Participant	UNDP, Jakarta	2002

No	Nama Kegiatan	Peran/Tugas	Penyelenggara (Kota, Negara)	Tahun
3.	ASEAN & Japan High Official Meeting on Caring Society, Human Resource development	Presenter	Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan, Tokyo, Japan	2006
4.	Seminar Presentation on Rehabilitation Program in Aceh After Tsunami at Naha University	Presenter	JSPS Naha University, Naha, Okinawa Prefecture, Japan	2006
5.	Senior Official Forum on Families, Denpasar, Bali, Indonesia, 4-5 September 2007	Co-host/ Steering Committee	MoSA, Denpasar, Indonesia	2007
6.	Follow-up Workshop: International Leadership Training on Social Security	Active Participant	GTZ-Inwent (Internationale Weiterbildung und Entwicklung GmbH, Berlin, Germany	2008
	Study Program on Social Welfare Services	Active Participant	Japan Foundation for the Welfare and Education for Asian People (FWEAP), Tokyo, Japan	2010

No	Nama Kegiatan	Peran/Tugas	Penyelenggara (Kota, Negara)	Tahun
7.	World Conference on Social Determinants of Health, 19-21 October 2011, Rio de Janeiro, Brazil	Active Participant	WHO, Rio de Janeiro, Brazil	2011
8.	DesiguALdades.net of Freie Universität “Conference on New Differences, Persistent Inequalities? Latin American Experiences”	Active Participant	Freie Universität, Berlin, Germany	2011
9.	The 15 <sup>th</sup> ASEAN-Japan High Level Officials Meeting on Caring Societies, theme “Healthy Development of Children for Future Generations”	Active Participant	Ministry of Health, Labour, and Welfare of Japan (MHLW), Fukuoka, Japan	2011
10.	Conference on International Leadership Training on Social Security	Active Participant	GIZ, Manila, Philippines	2012
11.	Conference on International Leadership Training on Social Security	Active Participant	GIZ, Hanoi, Viet Nam	2013

No	Nama Kegiatan	Peran/Tugas	Penyelenggara (Kota, Negara)	Tahun
12.	The 3 <sup>rd</sup> ASEAN Social Work Consortium (ASWC) Conference The 50 <sup>th</sup> Anniversary of OECD Conference	Presenter	ASEAN ASWC, Amari Watergate Hotel, Bangkok, Thailand	2014
13.	The 50 <sup>th</sup> Anniversary of OECD Conference	Active Participant	OECD, Paris, France	2014
14.	The 13 <sup>th</sup> ASEAN & Japan High Level Officials Meeting on Caring Societies “People-Centered Disaster Risk Reduction and Restoration”	Presenter	Japanese Ministry of Health, Labour, and Welfare (MHLW), Kobe, Japan	2015
15.	12 <sup>th</sup> SOMSWD and 11 <sup>th</sup> SOMSWD+3, and The Ninth ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development (9 <sup>th</sup> AMMSWD), “Strengthening Social Welfare Development in Pursuing ASEAN Community Vision 2025”	Chair SOMSWD (Host)	Ministry of Social Affairs of Indonesia, Hotel Borobudur, Jakarta, Indonesia	2016

No	Nama Kegiatan	Peran/Tugas	Penyelenggara (Kota, Negara)	Tahun
16.	Workshop on “The Promotion of Older People’s Association”	Presenter	Helpage, Siem Reap, Cambodia	2016
17.	AICHR Regional Workshop on Strengthening National Plans of Action on Trafficking in Persons to Ensure Effective Implementation of the ACTIP and APA	Active Participant	AICHR, Thailand, Phnom Penh, Cambodia	2016
18.	The AICHR Regional Workshop on Strengthening National Action of Action on Trafficking in Persons to Ensure Effective Implementation of the ACTIP and APA	Active Participant	AICHR, Phnom Penh, Cambodia	2016
19.	“The 13 <sup>th</sup> ASEAN Strengthening social protection to address challenges of ageing societies	Active Participant	AOMSWD, Yangoon, Myanmar	2017

No	Nama Kegiatan	Peran/Tugas	Penyelenggara (Kota, Negara)	Tahun
20.	The 2 <sup>nd</sup> ASEM Conference on Global Ageing and Human Rights of Older Persons	Presenter	The Government of South Korea, Seoul, Korea	2017
21.	Ageing Asia and the Pacific: Developing Long-term Care Systems and Effective Responses	Presenter	ADB Headquarter, Manila, Philippines	2017
22.	The Twelfth ASEAN Plus Three Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development (12 <sup>th</sup> SOMSWD+3), “Strengthening social protection to address challenges of ageing societies”	Active Participant	SOMSWD and Myanmar Ministry of Social Welfare, Relief & Resettlement, Yangon, Myanmar	2017

No	Nama Kegiatan	Peran/Tugas	Penyelenggara (Kota, Negara)	Tahun
23.	ASEAN-UNICEF Symposium on “Leaving No One Behind” in Commemoration of ASEAN’s 50 <sup>th</sup> Anniversary – Parallel Session on Disaster Risk Reduction and Urbanization/ Child Friendly City, Violence Against Children	Active Participant	UNICEF and the Government of Thailand, Bangkok, Thailand	2017
24.	AICHR Regional Dialogue on Mainstreaming of the Right to Education in the ASEAN Community	Active Participant	AICHR, Phnom Penh, Cambodia	2017
25.	The Third Meeting of the Task Force on The Mainstreaming of the Rights of Persons with Disabilities in the ASEAN Community, (‘Task Force’)	Active Participant	AICHR, Phuket, Thailand	2017

No	Nama Kegiatan	Peran/Tugas	Penyelenggara (Kota, Negara)	Tahun
26.	The 11 <sup>th</sup> TAGANA National Social Service Day”, Participated by ASEAN Member Countries	SOMSWD Focal Point (Host & Team Leader)	Ministry of Special Affairs of Indonesia, Tomohon & Minahasa, North Sulawesi Province, Indonesia	2017
27.	The Regional Consultation on Thematic Study on Legal Aid and The 4 <sup>th</sup> Task Force Meeting on the Mainstreaming of the Rights of Persons The Policy Dialogue on Building a Child-Friendly ASEAN with Disabilities in the ASEAN Community	Active Participant	AICHR-SOMSWD, Bangkok, Thailand	2017

No	Nama Kegiatan	Peran/Tugas	Penyelenggara (Kota, Negara)	Tahun
28.	The Policy Dialogue on Building a Child-Friendly ASEAN	Active Participant	The Ateneo Human Rights Center (AHRC) and the Department of Social Welfare and Development (DSWD) of the Philippines, Manila Philippines	2017
29.	Sharing Existing Social Protection Programmes and Mechanisms in Times of Disaster, Regional Consultation Workshop on Social Protection “Towards Developing Disaster-Responsive Social Protection in ASEAN	Active Participant	ASEAN SOMWSD, Bangkok, Thailand	2017
30.	Workshop on Monitoring and Evaluation Framework of ASEAN Decade of Persons with Disabilities	Active Participant	Ministry of Social Development and Human Security (MSDHS), Bangkok, Thailand	2017

No	Nama Kegiatan	Peran/Tugas	Penyelenggara (Kota, Negara)	Tahun
31.	ASEAN High Level Cross Regional Rountable on Violence Against Children. Placing Children at the Heart of the Sustainable Development Agenda: Accelerating Progress in Children's Protection from Violence	Active Participant	AICHR, Manila, Philippines	2017
32.	Coordinating Conference on the ASEAN Socio-Cultural Community Retreat, August 13-14, 2017, Manila, Philippines	Active Participant	ASEAN-ASCC, Manila, Philippines	2017
33.	ASCC COUNCIL DINNER	Active Participant	The Government of the Republic of Singapore, Singapore	2018

## Keterlibatan Dalam Pengelolaan Jurnal Ilmiah

No	Nama Jurnal	Penerbit	Peran/Tugas	Tahun
1.	Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial	Badan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI	Pembantu Ahli	1998–2001
2.	Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial	Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI	Editor in Chief	2002–2005
3.	Jurnal Aksi Sosial	Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Departemen Sosial RI	Penanggung Jawab	2008–2012

## Karya Tulis Ilmiah

### Kualifikasi Karya

No	Kualifikasi Karya	Jumlah
1.	Buku Internasional	2
2.	Buku Nasional	20
3.	Bagian dari Buku Internasional	2
4.	Bagian dari Buku Nasional	37

5.	Jurnal Internasional	9
6.	Jurnal Nasional	21
7.	Prosiding Internasional	1
8.	Prosiding Nasional	0
9.	Paten Internasional	
	Terdaftar	0
	Tersertifikasi	0
10.	Paten Nasional	
	Terdaftar	0
	Tersertifikasi	0
11.	Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)	0
12.	Rumpun atau Galur Hewan/Ikan/Benih Unggul Tanaman Hutan	0
13.	Hak Cipta	0
14.	Desain Industri	0
15.	Desain dan Tata Letak Sirkuit Terpadu	0
16.	Transaksi Lisensi	0

## Kualifikasi

No	Kualifikasi	Jumlah
1.	Penulis Tunggal	55
2.	Bersama Penulis Lainnya	37
	Total	92

## Kualifikasi Bahasa

No	Kualifikasi Bahasa	Jumlah
1.	Bahasa Indonesia	70
2.	Bahasa Inggris	22
3.	Bahasa Lainnya	0
	Total	92

## Kekayaan Intelektual

No	Kualifikasi Karya	Jumlah
1.	Patent Internasional	
	Terdaftar	0
	Tersertifikasi	0
2.	Patent Nasional	
	Terdaftar	0
	Tersertifikasi	0
3.	Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)	0
4.	Rumpun atau Galur Hewan/Ikan/Benih Unggul Tanaman Hutan	0
5.	Hak Cipta	0
6.	Desain Industri	0
7.	Desain dan Tata Letak Sirkuit Terpadu	0

## Kerjasama bersama Mitra

No	Kualifikasi Karya	Jumlah
1.	Transaksi Lisensi	0

## Pembinaan Kader Ilmiah

### Pejabat Fungsional Peneliti atau Perekayasa

No	Nama	Instansi	Peran/Tugas	Tahun
1.	-	.....	.....	.....
2.	-	.....	.....	.....
3.	-	.....	.....	.....
4.	-	.....	.....	.....
5.	-	.....	.....	.....

## Mahasiswa

No	Nama	Perguruan Tinggi/ Universitas	Peran/Tugas	Tahun
1.	Virna Emily Tobing-David	Universitas Indonesia	Ko-promotor mahasiswa program doktor ilmu kesejahteraan sosial Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia	2020-2024
2.	Ayu Diah Amalia	Universitas Airlangga	Dosen Mata Kuliah Pengantar Disertasi (MKPD) ilmu sosiologi konsentrasi gerontologi sosial, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia	2020-2025

## Organisasi Profesi Ilmiah

No	Jabatan	Nama Organisasi	Tahun
1.	Anggota	Himpenindo	2004–2021
2.	Anggota	Perhimpunan Periset Indonesia (PPI)	2021–Sekarang

## Tanda Penghargaan

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Satyalancana Karya Satya XX Tahun	Presiden Republik Indonesia	2010
2.	Australia Alumni Prize Award with Outstanding Commencement	Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), melalui Kedutaan Besar Australia di Jakarta	2013
3.	Satyalancana Karya Satya XXX Tahun	Presiden Republik Indonesia	2018

Percepatan perubahan sosial menempatkan Indonesia pada tantangan kesejahteraan yang kian kompleks, mulai dari kemiskinan yang persisten, ketimpangan spasial, dinamika migrasi, hingga penuaan penduduk. Fragmentasi kebijakan dan lemahnya integrasi antar-pemangku kepentingan kerap meminggirkan kelompok rentan dalam proses pembangunan sosial.

Orasi pengukuhan ini mengajukan Model Orkestrasi Ekosistem (MOE) sebagai kerangka konseptual dan praksis untuk membangun ekosistem kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan melalui orkestrasi peran negara, komunitas, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Model ini mengintegrasikan ecosystem orchestration, adaptive governance, dan knowledge co-evolution yang dipadukan dengan kearifan lokal serta praktik berbasis komunitas.

Bertumpu pada empat pilar—inkluisivitas kontekstual, kolaborasi lintas sektor, nilai lokal, dan digitalisasi berkeadilan—MOE menawarkan arah pembaruan tata kelola kesejahteraan sosial yang adaptif dan responsif. Berlandaskan refleksi akademik dan pengalaman praksis lebih dari tiga dekade, buku ini menegaskan kesejahteraan sebagai konstruksi kolektif yang memadukan ilmu pengetahuan, kebijakan publik, dan agensi komunitas.

BRIN Publishing  
*The Legacy of Knowledge*

Diterbitkan oleh:  
Penerbit BRIN, anggota Ikapi  
Gedung B.J. Habibie Lt. 8,  
Jln. M.H. Thamrin No. 8,  
Kota Jakarta Pusat 10340  
E-mail: penerbit@brin.go.id  
Website: penerbit.brin.go.id

DOI: 10.55981/brin.2822

